

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PROGRAM PADAT KARYA DALAM
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA
ULUBALANG KABUPATEN BONE**



OLEH:

FERI

105641103220

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

SKRIPSI

Efektivitas Program Padat Karya Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Ulubalang Kabupaten Bone

Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Studi Dan Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP)

Disusun dan Diajukan Oleh:

FERI

Nomor Stambuk : 105641103220

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Efektivitas Program Padat Karya Dalam
Pembangunan Infrastruktur Di Desa
Ulubalang Kabupaten Bone

Nama Mahasiswa : Feri

Nomor Induk Mahasiswa : 105641103220

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd

Muhammad Amril Pratama Putra, S.IP., M.AP

Mengetahui:

Dekan

Ketua Program Studi

Fisip Unismuh Makassar

Ilmu Pemerintahan

Dr.Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.si

NBM. 730 727

Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I

NBM. 1207 163

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima tim penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. berdasarkan keputusan dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Nomor: 0224/FSP/A.4-11/1/45/2024 Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh sarjana strata (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di makassar pada hari selasa 20 february 2024.



1. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd
2. Muhammad Amril Pratama Putra, S.IP., M.AP
3. Nursaleh Hartaman, S.IP., M.IP

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Feri
Nomor Induk Mahasiswa : 105641103220
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar skripsi penelitian ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di universitas muhammadiyah Makassar.

Makassar,

2024

Feri

ABSTRAK

Feri, 2024, Efektivitas Program Padat Karya Dalam Pembangunan Infrastrukturu Di Desa Ulubalang Kabupaten Bone. Skripsi, Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. (Dibimbing Oleh Ansyari Mone Dan Muhammad Amril)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program padat karya dalam pembangunan infrastruktur di Desa Ulubalang Kabupaten Bone. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak positif program tersebut terhadap kemajuan infrastruktur desa. Metode penelitian melibatkan survei lapangan, wawancara, analisis data statistik untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program padat karya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini secara signifikan meningkatkan akses perekonomian dan meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur, seperti jalan, jembatan. Hal tersebut dilihat dari teori efektivitas padat karya Martani dan Lubis yang digunakan untuk menggambarkan serta menjelaskan tentang padat karya dalam pembangunan desa yang ditinjau dari pendekatan sumber, pendekatan proses dan pendekatan sasaran.

Kata Kunci: Efektivitas, Infrastruktur, Tata Kelola, Pemerintahan Desa

ABSTRAK

Feri, 2024, Effectiveness of Labor Intensive Programs in Infrastructure Development in Ulubalang Village, Bone Regency. Thesis, Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Muhammadiyah University of Makassar. (Guided by Ansyari Mone and Muhammad Amril)

This research aims to determine the effectiveness of labor-intensive programs in infrastructure development in Ulubalang Village, Bone Regency. The main objective of this research is to evaluate the positive impact of the program on the progress of village infrastructure. The research method involves field surveys, interviews, statistical data analysis to measure the level of success in implementing labor-intensive programs. The research results show that this program significantly increases economic access and increases community access to infrastructure, such as roads and bridges. This can be seen from Martani and Lubis' labor-intensive effectiveness theory which is used to describe and explain labor-intensive work in village development in terms of the source approach, process approach and target approach.

Keywords: *effectiveness, infrastructure, governance, village government*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Alhamdulillah

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan taufik dan inayah-nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Efektivitas Program Padat Karya Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Ulubalang Kabupaten Bone”. Salawat dan salam penulis hanturkan kepada baginda nabiallah Muhammad SAW, yang telah menuntun kita semua dari alam yang gelap gulita sehingga alam yang terang menerang seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Penulis skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dengan segala kerendahan hati sepenuhnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan akan tetapi berkat rahmat Allah SWT, doa restu kedua orang tua dan dukungan dari berbagai pihak serta usaha maksimal sehingga segala hambatan dapat teratasi dan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini ucapkan terima kasih yang tak henti-hentinya mendoakan, mendukung dan memotivasi penulis hingga sampai titik ini.

Kepada ayahanda tercinta “Ambo Tuo” dan ibunda tersayang “Upe” terima kasih telah menjadi orang terbaik dalam hidupku yang penuh cinta dan keikhlasan dalam mendukung setiap langkah yang penulis lakukan. Kedua kakakku yang tersayang “Agus Salim” dan “Irma” serta keluargaku yang terus memberikan dukungan motivasi hingga penulis sampai titik ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
3. Bapak Ahmat Harakan, S.IP., M.H.I selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Ibu Nur Khaerah, S.IP., M.IP selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Bapak Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Amril Pratama Putra, S.IP., M.AP selaku Pembimbing II yang tidak kenal lelah memberikan bimbingan, mengarahkan, mengoreksi, serta selalu mendorong dan membantu untuk menyemangatin penulis hingga menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak/ Ibu Dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah mengajarkan berbagai materi perkuliahan dan ilmu pengetahuan yang tak terhingga kepada penulis.
6. Kepada Pemerintahan Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone beserta jajarannya yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan membantu dalam proses selama penelitian.
7. Kepada kedua orang tua penulis ayahanda tercinta “Ambo Tuo” dan ibunda “Upe” yang menjadi orang terbaik dalam hidupku yang penuh cinta dan keikhlasan dalam mendukung setiap langkah yang penulis lakukan.
8. Kepada kakak penulis yang tersayang “Agus Salim” dan “Irma” yang telah membantu, memberikan motivasi dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Rekan-Rekan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Angkatan 2020 yang telah membantu memberikan informasi-informasi akademik dan telah membersamai penulis hingga penulisan skripsi ini.
10. Teristimewa Syamsidar, Muh. Raufun, Cica Suliati, Alana Quenca Salim yang telah mendukung dan membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

11. Semua pihak yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu pada kesempatan ini, semoga segala bantuannya bernilai ibadah disisinya Allah SWT.

Semoga segala bantuan dan dukungannya mendapatkan pahala disisinya Allah SWT. Demi perbaikan selanjutnya kritik dan saran yang membantu akan penulis terima dengan sangat rendah hati. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan semua pihak yang memerlukannya.

Wassalamualaikum watahmatullahi wabarakatu

Makassar,

2024

Feri



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN TIM PENGUJI	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Landasan Teori	10
1. Efektivitas	10
2. Padat Karya	16
3. Pembangunan Infrastruktur	22
4. Partisipasi Masyarakat	28

C. Kerangka Pikir	33
D. Fokus Penelitian.....	34
E. Deskripsi Fokus	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	37
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	37
B. Jenis dan Tipe Penelitian	37
C. Sumber Data	38
D. Informan	39
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
B. Penyajian Hasil Data Penelitian.....	54
C. Pembahasan	81
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	99
RIWAYAT HIDUP	123

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan	40
Tabe 3.2 Luas Wilayah Kabupaten Bone	44
Tabel 3.3 Ketinggian Wilayah Dusun	48
Tabel 3.4 Pembangunan Desa	83
Tabel 3.5 Anggaran Pembangunan	87



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 penelitian terdahulu	8
Gambar 2.2 kerangka pikir.....	33



DAFTAR LAMPIRAN

Pembimbing Penulisan Skripsi	100
Persetujuan Seminar Hasil	101
Hasil Perbaikan Ujian Hasil	102
Surat Pengantar Penelitian	103
Permohonan Izin Penelitian	104
Izin Penelitian	105
Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	107
Persetujuan Hasil Penelitian	108
Hasil Perbaikan Ujian Hasil	109
Persetujuan Ujian Akhir	110
Hasil Perbaikan Ujian Akhir	111
Surat Keterangan Bebas Plagiat	112
Dokumentasi Hasil Penelitian	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Era modernisasi pembangunan merupakan salah satu tujuan untuk mencapai efektivitas dalam pembangunan infrastruktur, dimana era globalisasi saat ini pembangunan infrastruktur di Indonesia khususnya program padat karya dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut dalam pelaksanaan pembangunan yang direncanakan dalam bentuk penerapan transparansi yang dapat mensejahterakan masyarakat, (Windiasih, 2019)

Pembangunan infrastruktur daerah memiliki tujuan atau perencanaan dalam program desa yang direncanakan dalam jangka waktu yang ditentukan dan melibatkan masyarakat secara aktif yang disesuaikan dengan kebutuhan desa, (Ohoirat, 2021)

Berdasarkan Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, dikemukakan bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan Masyarakat Desa, baik pembangunan yang bersifat fisik maupun non fisik. Pembangunan yang paling cepat terasa manfaatnya yaitu pembangunan fisik, maka dari itu hampir setiap desa selalu mendahulukan yang namanya pembangunan yang bersifat fisik termasuk yang dilakukan oleh Desa Ulubalang Kabupaten Bone, (Hidayah, 2020)

Desa pada pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan daya atau kekuatan pada masyarakat dengan cara memberi dorongan, peluang, kesempatan, dan perlindungan dengan tidak mengatur dan mengendalikan kegiatan masyarakat yang diberdayakan untuk mengembangkan potensinya sehingga masyarakat tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan mengaktualisasikan diri atau berpartisipasi melalui berbagai aktivitas, (Sumarto, 2019)

Kartasasmita, Mengatakan “Pembangunan Desa sebagai suatu usaha sadar dalam serangkaian kegiatan untuk mencapai suatu perubahan dari keadaan yang buruk menuju keadaan yang lebih baik yang dilakukan oleh masyarakat tertentu disuatu negara”, (Sarlina, 2022)

Menurut Suparno, Pembangunan Desa merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka imbang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat dimana pemerintah wajib menyediakan sarana-prasarana dan masyarakat yang mengembangkan kemampuannya sendiri (Approach, 2016)

Menurut Ahmadi, Pembangunan Desa adalah perpaduan serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak Pemberdayaan Masyarakat melalui pembangunan infrastruktur pada dasarnya adalah suatu proses pertumbuhan dan perkembangan kekuatan masyarakat untuk ikut terlibat dalam berbagai aspek pembangunan di suatu wilayah. Dengan adanya pemberdayaan bisa melepaskan masyarakat dari keterbelakangan dan kemiskinan, sehingga masyarakat mampu bersaing dengan dunia luar, (Deswimar, 2014)

Tujuan pembangunan suatu negara dilaksanakan pada hakikatnya adalah untuk mensejahterahkan masyarakat, demikian halnya dengan Negara Indonesia, dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan pembangunan nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya, dalam mewujudkan tujuan program pembangunan pada setiap lembaga dibutuhkan suatu pola manajerial dalam pengelolaan, (Latif, 2019)

Tujuan utama pembuatan kebijakan ini adalah memberdayakan masyarakat yang menganggur sehingga mereka dapat menghidupi keluarganya. Kebijakan Padat Karya sebenarnya diperuntukkan kepada masyarakat yang tidak bisa bekerja di perdesaan maupun perkotaan dikarenakan ketidakmampuannya untuk berkompetisi mendapatkan pekerjaan, sehingga mereka mempunyai kemungkinan menganggur, (Roni, 2019)

Prinsip dari program padat karya yaitu dilaksanakan secara swakelola, dengan lebih mengutamakan tenaga kerja dan bahan baku setempat serta upah diberikan secara harian/mingguan. Walaupun

saat ini angka pengangguran diperdesaan lebih kecil dari pada di perkotaan saat ini, tapi jumlah angka pengangguran di perdesaan tergolong masih cukup tinggi. Maka dari itu program padat karya yang akan menyedot banyak tenaga kerja sangat dibutuhkan untuk mempercepat mengurangi angka pengangguran, (Risa, 2021).

Menurut Sumpeno perencanaan pembangunan desa merupakan suatu panduan atau model penggalian potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitikberatkan pada peranserta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan dalam konsep pembangunan partisipatif (Hidayat, 2017)

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur sangat dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat itu sendiri. Asumsi dasar pentingnya partisipasi masyarakat dalam program pembangunan dianggap mampu memanfaatkan sumber daya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas dalam rangka mencapai sasaran pembangunan masyarakat, (Meilinawati, 2018)

Pembangunan infrastruktur di Desa bersumber dari anggaran Desa setiap masing-masing desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggaran tersebut telah dialokasikan pada masing-masing desa dan digunakan untuk pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, (Agussalim, 2015)

Desa ulubalang merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk 3.112 dengan kehidupan masyarakat mayoritas petani. Pembangunan akses Infrastruktur jalan, jembatan, maupun pengerasan jalan tani sangat membantu kehidupan masyarakat dalam memudahkan aktifitas dalam pertanian.

Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Desa Ulubalang menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat. Dalam pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan menjadi proyek Desa Ulubalang yang berusaha membuka aksesibilitas yang lebih baik untuk menghubungkan desa dengan pusat-pusat ekonomi dan wilayah sekitarnya. Jalan yang baik dan jembatan yang kokoh tidak hanya mempermudah transportasi barang dan jasa, tetapi juga memunculkan aksesibilitas pendidikan dan layanan kesehatan (Bahtera & Herizal, 2022)

Pembangunan ini menciptakan peluang pekerjaan lokal melalui program padat karya, memberikan dampak positif terhadap perekonomian desa. Dengan meningkatkannya infrastruktur, desa ulubalang dapat bergerak maju dalam pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi penduduknya.

Dalam program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Desa Ulubalang menjadi fokus permasalahan bagi Pemerintah Desa Ulubalang. Memahami kebutuhan transportasi lokal warga untuk memastikan infrastruktur yang dibangun dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mendukung aktivitas ekonomi, merencanakan strategi pemeliharaan jangka

panjang dan memastikan keberlanjutan infrastruktur agar dapat memberikan manfaat jangka panjang dan memastikan efisien dalam pengelolaan sumber daya.

Anggaran pembangunan infrastruktur dalam program padat karya di desa ulubalang bersumber dari dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa. Sejauh ini pembangunan infrastruktur di desa ulubalang kabupaten bone masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat, hal ini disebabkan masih banyak masyarakat yang keluhkan terkait dengan pembangunan yang belum sepenuhnya berjalan dengan efektif dan efisien.

Dengan hal ini mengangkat judul tentang efektivitas program padat karya dalam Pembangunan infrastruktur di desa, dimana masih banyak pembangunan desa yang terencana yang belum berjalan dengan baik dalam pembangunan infrastruktur di desa ulubalang seperti jalan tani, dan jembatan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik dalam melakukan penelitian terkait dengan “Efektifitas Program Padat Karya Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Ulubalang Kabupaten Bone”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penejelasan diatas, maka inti permasalahan yang menjadi pusat perhatian adalah bagaimana Efektivitas Program Padat Karya Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Ulubalang Kabupaten Bone.

C. TUJUAN PENELITIAN

Sehubungan dengan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Program Padat Karya Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Ulubalang Kecamatan Bone.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat, baik dari aspek teoritis maupun aspek praktis, serta kepada pihak-pihak yang membutuhkannya.

- a. Secara teoritis, dari hasil ini dapat memberikan kontribusi serta dapat menambahkan wawasan, dan bahkan menambahkan pengetahuan yang menjadi bahan studi yang merupakan salah satu sumbangsi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu khususnya pada bidang ilmu pemerintahan.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan atau saran bagi pemerintah desa dalam menjalankan program padat karya dalam pembangunan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan dengan pembangunan infrastruktur terdapat berbagai artikel yang membahas mengenai padat karya dalam pembangunan infrastruktur diantaranya, partisipasi masyarakat dalam pembangunan tahunan, (Hariyanto, 2014) dan perencanaan partisipatif dalam pembangunan daerah, (Puspasari, 2013) Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani melalui Program Padat Karya, (Mael, 2017), Efektivitas Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, (Fitri, 2019)

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Padat Karya Tunai, (Dian, 2019), Pengaruh Padat Karya Tunai Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pedesaan, (Herdiyana, 2020). Beberapa membahas Perencanaan Pembangunan Partisipatif Guna Mewujudkan Aspirasi Masyarakat Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, (Juwandi, 2022) dan threesector pathership dalam pembangunan ekonomi, (Fanida, 2014)

Adapun perbedaan dan persamaan dalam penelitian terdahulu mengenai padat karya dalam pembangunan infrastruktur telah menjadi fokus perhatian dalam upaya memahami dampak dan efektivitas dari pendekatan ini.

Perbedaan yang signifikan dalam penelitian terdahulu. Beberapa studi mayoritas bahwa efektivitas padat karya dapat bervariasi tergantung pada desain program pengelolaan yang tepat dan kualitas dalam pembangunan infrastruktur yang dihasilkan.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa padat karya mengidentifikasi tantangan dalam mengukur dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Persamaan yang ditemukan dalam penelitian sebelumnya adalah penekanan pada penciptaan lapangan kerja sebagai salah satu manfaat utama dari padat karya. Penelitian telah menunjukkan bahwa padat karya efektif dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal.

Penelitian terdahulu tentang padat karya dalam pembangunan infrastruktur telah menyoroti persamaan dalam manfaat peningkatan lapangan kerja, tetapi juga berbeda dalam efektivitas, biaya, dan dampak jangka panjang.

B. LANDASAN TEORI

1. Efektivitas

Efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan atau sasaran. Dikatakan efektif, jika tujuan atau sasaran yang ditentukan telah tercapai. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan oleh setiap organisasi, (Renyam, 2019)

Robert Chambers mengemukakan bahwa secara komprehensif, efektivitas diartikan sebagai tingkat kemampuan lembaga atau organisasi melaksanakan tugas pokoknya dan mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, (Handayani, 2023)

Prawirosentoso mengatakan bahwa efektivitas adalah kondisi dinamis serangkaian proses pelaksanaan tugas dan fungsi pekerjaan sesuai dengan tujuan dan sarana kebijakan program yang telah ditetapkan. Sedangkan efisiensi bisa diartikan sebagai sesuai atau tepat untuk menghasilkan sesuatu tanpa membuang biaya, waktu dan tenaga, dapat menjalankan tugas secara cermat dan tepat, bertepatan guna, berdaya guna, (Muziza, 2020)

Berdasarkan efektivitas penggunaan dana desa, ada beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan yakni:

- a. Pencapaian Tujuan, bahwa penggunaan dana desa dapat dikatakan efektif apabila penggunaannya sesuai dengan prioritas kebutuhan sehingga tujuan tercapai
- b. Ketepatan Waktu, proses penyaluran dan penggunaan dana sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan hingga berakhirnya kegiatan
- c. Sesuai Manfaat, dana desa dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa sebagai penerima program
- d. Hasil sesuai harapan masyarakat, (Nurhayati, 2019)

Efektivitas dalam pembangunan infrastruktur dapat ditingkatkan dengan perencanaan yang matang, pengelolaan anggaran yang efisien, pemilihan teknologi yang tepat, serta keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan.

Menurut Robert H. Mils dalam (Dwiandini dan Salomo, 2013) menyebutkan terdapat beberapa ukuran efektifitas, lebih lanjut Mils mengemukakan salah satu ukuran efektifitas adalah *Participations and shared influence*, yakni melihat sejauh mana masyarakat berpartisipasi dalam membuat satu keputusan atau kebijakan yang secara langsung mempengaruhi mereka atau berdampak langsung kepada masyarakat, (Setyadiharja, 2018)

Efektivitas dalam program padat karya di desa dapat meningkatkan efektivitas melalui pengelolaan proyek yang baik, partisipasi masyarakat, pelatihan keterampilan, dan pemantauan yang teratur. Dengan memastikan alokasi sumber daya yang efisien dan melibatkan warga setempat, program tersebut dapat memberikan dampak positif pada pengembangan desa, (Aziz, 2016)

Menurut Effendy mendefinisikan efektivitas sebagai komunikasi dimana terdapat suatu tujuan yang harus dicapai dan disesuaikan dengan biaya yang telah ditetapkan, waktu yang telah ditentukan serta jumlah personil yang akan terlibat. Dikatakan efektif jika tujuan tersebut dapat tercapai secara maksimal dan memiliki tingkat akurasi yang tinggi dari perencanaan awal, (Setianingsih, 2019)

Adapun faktor penentu efektivitas sebagai beriku :

- 1) Faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan

- 2) Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan baik struktural maupun fungsional
- 3) Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaannya baik pimpinan maupun masyarakat
- 4) Faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut kedalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud, (Nadira, 2022)

Huseini yang menyatakan bahwa, “Pendekatan pencapaian tujuan menggunakan tujuan dan sasaran sebagai ukuran efektivitas organisasi. Jika tujuan dinyatakan sebagai keadaan yang ingin dicapai oleh organisasi di masa datang, sasaran dapat digambarkan sebagai tujuan antara yang lebih bersifat operasional.

Efektifitas dalam sebuah organisasi menyangkut dua aspek oleh karena itu penting diterapkan dalam sebuah organisasi karna aspek yang menyangkut tujuan organisasi dan pelaksanaan fungsi atau cara untuk mencapai tujuan. Efektifitas jika dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan pemerintah dalam pelaksanaan pembanguna infrastruktur karna efektifitas mengarah ke tujuan dan pencapaian dengan tepat waktu yang telah ditetapkan, (Rama, 2023)

Adapun kriteria yang bisa di gunakan untuk pencapaian efektif yang dikemukakan oleh Sondang P.Siagian, yaitu :

- a) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai

hal ini dimaksudkan agar karyawan/staf dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat di capai.

b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan

telah diketahui bahwa adalah “pada jalan” yang di ikuti dalam melakukan berbagai upaya untuk mencapai sasaransasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

c) Proses analisis dan perumusan kebijakan

berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

d) Perencanaan yang matang

pada hakekatnya memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.

e) Perencanaan program yang tepat

suatu rencana yang baik masi perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan berkerja.

f) Tersedianya sarana dan prasarana kerja

Salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.

g) Pelaksanaan yang efektif dan efisien

bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya

h) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian, (Yanti, 2022)

Martani dan Lubis, yaitu tingkat efektivitas diukur menggunakan 3 pendekatan sebagai berikut :

a. Pendekatan sumber (*resource approach*).

Pendekatan ini mengutamakan keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

b. Pendekatan proses (*process approach*).

Pendekatan Proses merupakan pelaksanaan Padat Karya dalam program perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggung jawaban secara tertib dan transparan

c. Pendekatan sasaran (*goals approach*)

Hasil dari program Dana Desa bisa terlihat dari realisasi program-program yang telah direncanakan sebelumnya. Berdasarkan data realisasi Padat karya Tunai Dana Desa, (Jazuli, 2021)

Menurut Agung Kurniawan dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya” (Olbata, 2018)

Menurut Steers yang di kutip oleh Sutrisno , menyatakan bahwa : ”Pada umumnya efektivitas hanya dikaitan dengan tujuan organisasi, yaitu laba, yang cenderung mengabaikan aspek terpenting dari keseluruhan prosesnya, yaitu sumber daya manusia”.

Mmenurut Edi menjelaskan bahwa : ”Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”, (Saepul, 2022)

2. Padat Karya

Padat karya merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam bidang pembangunan yang melibatkan masyarakat dalam jumlah yang banyak dalam kegiatan. Program padat karya Desa bertujuan untuk penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan pembangunan secara swakelola dan padat karya tunai, memupuk rasa kebersamaan, dan gotong royong.

partisipasi masyarakat Desa, meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat Desa, mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin, perempuan, anak, dan kelompok marginal kepada pelayanan dasar, dengan berbasis pendekatan pemberdayaan masyarakat, menekan jumlah

penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin, dan membangkitkan kegiatan sosial dan ekonomi di Desa, (Sofi, 2020)

pelaksanaan program padat karya dapat berupa kegiatan pembangunan di desa yang berdasarkan pada daftar kewenangan desa, seperti berupa perbaikan dan juga perbaikan alur sungai dan irigasi, pembangunan jalan maupun jembatan.

Fajarwati & Rahmadila menyebutkan bahwa pada sebuah program memiliki dukungan sumber daya yang memadai yang dapat mencapai tujuan pelaksanaan kebijakan agar berjalan semestinya atau tidak, (Novanto, 2023)

Berdasarkan pedoman umum pelaksanaan padat karya tahun 2018, padat karya memiliki tujuan berupa yaitu:

- a. Peningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat
- b. Meningkatkan budaya gotong royong dan partisipasi
- c. Masyarakat pembukaan lapangan kerja, menekan jumlah masyarakat miskin
- d. Penganggur dan setengah penganggur
- e. Membangkitkan kegiatan ekonomi dan sosial di desa
- f. Peningkatan akses masyarakat kelompok marginal pada pelayanan dasar, (Setiawa & Megawati, 2022)

Keterlibatan masyarakat pada program Padat Karya Tunai merupakan bentuk realisasi pemberdayaan yang bertujuan untuk melibatkan masyarakat terutama masyarakat menganggur.

Menurut Beni (2016) Maka program ini merupakan program pemberdayaan ekonomi, dikarenakan program ini diperuntukkan sebagai upaya meningkatkan kemampuan atau memberdayakan masyarakat menganggur terutama untuk meningkatkan pendapatan, (Pawening, 2021)

Pendekatan padat karya dalam pembangunan infrastruktur desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan melibatkan warga desa dalam proyek-proyek pembangunan, tidak hanya memperbaiki infrastruktur, tetapi juga menciptakan lapangan kerja lokal. Pengawasan yang ketat dan partisipasi aktif dari masyarakat dapat memastikan efisiensi dan keberlanjutan program padat karya.

Dalam Melaksanakan peningkatan pembangunan diperlukan Sumber Daya Manusia yang mampu merencanakan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan lebih lanjut secara partisipatif. Secara umum faktor yang mempengaruhi dalam koordinasi pembangunan ada yang berupa faktor pendukung dan faktor penghambat.

- 1) Sumber Daya Aparatur Desa

Dalam Melaksanakan peningkatan pembangunan diperlukan Sumber Daya Manusia yang mampu merencanakan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan lebih lanjut secara partisipatif.

- 2) Partisipasi Masyarakat

Bentuk konkrit dari partisipasi masyarakat dalam perencanaan program pembangunan dapat berupa kehadiran masyarakat pada saat menyusun rencana program berlangsung serta kegiatan desa lainnya, (Mahayana, 2013)

Menurut Adisasmita, Karakteristik masyarakat itu sendiri memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Asumsi yang mendasarinya adalah keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan penting untuk memanfaatkan sumber daya guna meningkatkan produksi dan produktivitas guna memenuhi tujuan masyarakat. Untuk dapat mengurangi sebagian dari ketergantungan mereka pada pemerintah, anggota masyarakat berupaya meningkatkan kemampuan dan kemauan sumber daya manusia mereka, (Hasan, 1967)

Sasaran program padat karya Desa berdasarkan Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Kementerian PPN/Bappenas sebagai berikut:

- a) Penganggur, yaitu penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan,
- b) Setengah Penganggur, yaitu Penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal (<35 jam seminggu) dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan,
- c) Penduduk Miskin, yaitu penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan
- d) Stunting, yaitu penduduk yang memiliki balita bermasalah gizi,

(Yuliana, 2016)

Konsep Padat Karya Tunai adalah sebuah program dari pemerintah yang meliputi kegiatan dalam rangka memberdayakan masyarakat yang ada di tingkatan desa, terkhusus bagi mereka yang tidak mempunyai pekerjaan atau pendapatan yang tetap, kegiatan ini menstimulus sumber daya manusia dalam peningkatan perekonima, para pekerja, dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Mengarah pada perbaikan program pemberdayaan yang bertekad untuk melibatkan desa atau masyarakat setempat yang ditunjukkan dengan kapasitas mereka yang sebenarnya, (Sarfana, 2022)

Pemerintah perlu memiliki kemauan yang kuat untuk menginvestasikan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dibidang peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan cara ini, program kedua kementerian dapat menciptakan sinergi untuk menciptakan lapangan kerja dan sekaligus mengatasi pengangguran. Jika di Indonesia masih belum bisa mengendalikan industri padat modal bisa diganti dengan penerapan industri padat karya dengan merekrut atau menyiapkan SD (Sekolah Dasar) dari lulusan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) bidang vokasi untuk mengurangi pengangguran karena industri padat karya lebih sesuai diterapkan sesuai keadaan sekarang, (Djunaidi, 2022)

- a. Solusi Dilema Upah merupakan Solusi yang dapat diberikan untuk dilema upah ini adalah pemerintah atau pengusaha dapat memberikan sistem bonus kepada karyawan sehingga ada apresiasi untuk kinerja karyawan yang pekerjaannya dikategorikan bagus. Solusi Meningkatkan Mutu Tenaga Kerja Lokal

- b. Solusi untuk mutu tenaga kerja lokal adalah meningkatkan mutu jenjang pendidikan karyawan atau tenaga kerja demi kemajuan perusahaan. Menurut Indrawan, Megasari, Purwanti & Satria (Daraba, Subianto dan Salam, 2018) untuk menyediakan sumber daya manusia yang bermutu dibutuhkan rekrutmen dan pelatihan tenaga kerja yang terencana.
- c. Solusi Dilema Tuntutan Tenaga Kerja Lokal, Mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, aturan turunan dalam Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja harus diatur secara jelas dan rinci. Khususnya menyangkut investor yang menghadirkan tenaga kerja asing wajib mentransfer pengetahuannya kepada tenaga kerja lokal.
- d. Solusi Dilema Mengundang Investasi Asing merupakan Solusi yang dapat diberikan adalah menarik minat pemilik modal dalam negeri untuk berinvestasi di dalam negeri dengan memberikan keuntungan dari dana yang ditanam, namun juga membantu pertumbuhan dalam negeri.

Manfaat Padat Karya yaitu, menyediakan lapangan kerja bagi keluarga miskin, pengangguran, setengah pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk (*stunting*), menguatkan rasa kebersamaan, keswadayaan, kegotongroyongan, dan partisipasi masyarakat.

Memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal, meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan daya beli masyarakat desa, serta mengurangi jumlah keluarga miskin, pengangguran, setengah pengangguran, keluarga dengan balita gizi buruk (*stunting*), (Budiasa, 2019)

Penerapan padat karya dalam pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan melibatkan pekerjaan manual yang melibatkan masyarakat setempat, seperti pembersihan, perataan tanah. Selain membersihkan dampak positif pada keberlanjutan jalan, program padat karya ini juga menciptakan lapangan kerja lokal dan memberdayakan masyarakat desa secara ekonomi.

Dalam pengelolaan yang baik, program ini dapat mempercepat pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan meningkatkan keterlibatan komunitas dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

3. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan merupakan konsep normatif yang mengisyaratkan pilihan-pilihan tujuan untuk mencapai apa yang disebut sebagai realisasi potensi manusia. Pembangunan tidak sama maknanya dengan modernisasi, jika memahami secara jelas mengenai makna sesungguhnya dari hakikat pembangunan itu sendiri.

Menurut Todaro pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia bahwa pembangunan ekonomi telah digariskan kembali dengan dasar mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi atau ekonomi negara yang sedang berkembang, (Sulastri, 2016)

Fadel Muhammad sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat, (Posumah, 2015)

Perencanaan Pembangunan Desa merupakan suatu panduan atau model penggalian potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan. Perencanaan yang menghasilkan program pembangunan yang diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan, kemakmuran dan perdamaian rakyat dalam jangka panjang, (Azizah, 2017)

Menurut Basuki Pembangunan ialah sesuatu usaha buat meningkatkan kualitas dalam kehidupan manusia, sehingga aspek manusia pasti hendak jadi domain pembangunan. Pembangunan secara metafisis yakni ekspedisi yang bertolak dari kenyataan mengarah desiderata ialah dalam tahap-tahapnya bawa kita seluruh kehari besok yang lebih terang, dengan kualitas kehidupan yang lebih bertambah, (Putra, 2022)

Melaksanakan pembangunan Melaksanakan pembangunan suatu perubahan ke arah kondisi yang lebih baik melalui upaya dan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terstruktur dan terencana oleh pemerintah dan masyarakat.

Dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur dengan memberdayakan sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, (Chotimah, 2019)

Berdasarkan Botkin Dan Supriyatna menyatakan bahwa, pembangunan masyarakat pedesaan merupakan bagian dari pembangunan masyarakat atau sosial dan pembangunan desa serta pembangunan pedesaan yang diarahkan pada kelembagaan dan partisipasi masyarakat miskin dalam meningkatkan kesejahteraan pada suatu wilayah pedesaan yang jumlah penduduk relatif banyak, (Santika, 2022)

Menurut Usman bahwa terdapat 6 (Enam) unsur dalam pembangunan masyarakat terpadu, yaitu:

- a. Pembangunan pertanian dengan padat karya
- b. Memperluas kesempatan kerja
- c. Intensifikasi tenaga kerja dengan industri kecil
- d. Mandiri dan meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan
- e. Mengembangkan perkotaan yang dapat mendukung pembangunan pedesaan
- f. Membangun kelembagaan kelompok tani yang dapat melakukan koordinasi proyek multisector, (Tenri, 2019)

Konkon Subrata memberikan batasan tentang pembangunan masyarakat yaitu: “Pembangunan masyarakat adalah proses evaluasi dimana sekelompok manusia yang mempunyai persamaan kebutuhan dan aspirasi bekerjasama untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi yang lebih baik, materil dan ispritual bagi perseorangan dan masyarakat”, (Kulla, 2018)

Penyerapan sumber daya lokal pada pembangunan infrastruktur perdesaan. berdasarkan, (Asnudin, 2009) mengemukakan bahwa penyerapan sumber daya lokal dalam pembangunan infrastruktur ada 3 sebagai berikut:

- 1) Pembangunan infrastruktur jalan penyerapan material cukup tinggi. Hal ini, berkaitan dengan jenis konstruksi yang digunakan, yaitu konstruksi lapis batu pasir (*sirtu*) tetapi penyerapan tenaga kerja lokal (masyarakat setempat) untuk beberapa lokasi sangat rendah akibat beberapa faktor, seperti volume pekerjaan yang besar dan lokasi pekerjaan yang sulit/berat sehingga membutuhkan penggunaan alat berat
- 2) Pembangunan infrastruktur jembatan, sanitasi lingkungan, dan sarana air bersih menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi sebagai pekerja ataupun sebagai suplayer material dan peralatan. Tingkat partisipasi tersebut, sangat terkait dengan tingkat keahlian (*knowledge*), tingkat keterampilan, dan produktivitas, serta kondisi atau potensi desa yang berkaitan dengan sumber daya alam.

3) Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan belum optimal, seperti belum terlaksananya rembug-rembug warga secara rutin, fungsi dan peran kader desa dan kelompok penerima manfaat belum berjalan.

Menurut J'afar M. menyatakan bahwa, infrastruktur memiliki peranan positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan jangka pendek menciptakan lapangan kerja sektor konstruksi dan jangka menengah dan panjang akan mendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas sektor-sektor terkait, (Suryawardana, 2015)

Menurut Aloysius (dalam Lincoln Arsyad, 2010) Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Kinerja ekonomi mempengaruhi perkembangan manusia melalui tingkat pendapatan, distribusi pendapatan dalam masyarakat. Sedangkan pembangunan manusia melalui pendidikan dan kesehatan yang baik sangat menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, (Defianti, 2021)

Menurut Rondinelli dalam Yusran Lapananda (2013) merupakan pemanfaatan hasil pembangunan fisik desa yaitu dengan membangun atau memperbaiki prasarana jalan desa akan menciptakan atau memperbaiki kehidupan masyarakat desa.

Pembangunan prasarana jalan, masyarakat dapat menggunakan jalan tersebut dengan berbagai kebutuhan yang mereka perlukan, seperti melakukan mobilitas, pemasaran hasil pertaniannya, mengangkut hasil pertanian agar lebih mudah dan lain-lain, (Mamoto, 2018)

Manfaat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu:

- a) Mampu merangsang timbulnya swadaya masyarakat yang merupakan dukungan penting dalam pembangunan
- b) Mampu meningkatkan motivasi dan keterampilan masyarakat dalam membangun
- c) Pelaksanaan pembangunan semakin sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat
- d) Jangkauan pembangunan menjadi luas, meskipun dengan dana yang terbatas
- e) Tidak menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah, (Asnudin, 2010)

Pelaksanaan pembangunan dan pengentasan kemiskinan melalui pembangunan yang berpusat pada masyarakat yang kemudian mendasari wawasan pengelolaan sumber daya lokal (*community based resource management*) yang merupakan mekanisme perencanaan yang berpusat pada pembangunan, (Mahameru, 2021)

4. Partisipasi Masyarakat

Menurut Juliantara partisipasi diartikan sebagai keterlibatan setiap warga negara yang mempunyai hak dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya, partisipasi masyarakat merupakan kebebasan dan berbicara dan berpartisipasi secara konstruktif, (Deviyanti, 2007)

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur merupakan kunci dalam melibatkan warga desa dalam identifikasi kebutuhan infrastruktur, pengambilan keputusan terkait proyek, serta pelaksanaan dan pemeliharaan infrastruktur, serta transparansi informasi untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi komunitas dipertimbangkan dalam setiap tahap pembangunan.

Menurut Abe Perencanaan Partisipatif yang melibatkan masyarakat akan mempunyai dampak yang sangat penting dalam pembangunan, yaitu: terhindar dari peluang terjadinya manipulasi, memberikan nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan, serta meningkatkan kesadaran dan ketrampilan politik masyarakat, (Laily, 2015)

Menurut Cohen dan Uphoff, menyatakan bahwa partisipasi dapat merupakan keluaran pembangunan dan juga merupakan masukannya sebab apabila masyarakat yang bersangkutan tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan suatu proyek di Desanya, maka proyek itu pada hakekatnya bukanlah proyek pembangunan desa, (Mondong, 2013)

Partisipasi sudah menjadi bahasa yang umum dan sangat dikenal sejak dulu, partisipasi tiba-tiba menjadi sesuatu yang harus didorong. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah saja karena dana pemerintah terbatas jika dibandingkan dengan keinginan membangun,(Lubis, 2009)

Menurut Putnam, mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan seseorang atau masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan perdesaan, termasuk dalam membangun infrastruktur perdesaan, adalah berkaitan dengan situasi saling ketergantungan, kepercayaan dan jaringan organisasi sosial yang memfasilitasi kerjasama untuk manfaat bersama, (Nur, 2011)

Bentuk (tahap) partisipasi yang dikemukakan oleh Ndraha sebagai berikut:

- a. Partisipasi dalam/melalui kontak dengan pihak lain sebagai salah satu titik awal perubahan sosial.
- b. Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan
- c. terhadap informasi,
- d. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan,
- e. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan.
- f. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan.
- g. Partisipasi dalam menilai pembangunan,Kemampuan kelompok sasaran, (Hardianti, 2017)

Menurut Abe dalam Deviyanti dijelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan memiliki tiga dampak, yakni

- 1) Keterlibatan secara langsung memberikan akan memperjelas mengenai peluang terhindar dari praktik manipulasi
- 2) Semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam proses perencanaan menjadi nilai tambah sendiri untuk legitimasi umusan
- 3) Meningkatkan keterampilan dan kesadaran berpolitik masyarakat, (Ramadhan & Ma'ruf, 2022)

Menurut Dunn mengemukakan bahwa “Kelompok sasaran (*target group*) adalah orang, masyarakat atau organisasi yang kepada mereka suatu kebijakan atau program diharapkan memberikan akibat”. Masyarakat selaku kelompok sasaran diharapkan menjadi pihak yang menikmati hasil suatu program, harus ditentukan secara jelas guna memobilisasi sumber-sumber yang dimiliki kelompok-kelompok masyarakat, (Lestanata, 2016)

Indikator Partisipasi Masyarakat Menurut Mubyarto adalah:

- a) Terlibat memikul tanggung jawab pelaksanaan pembangunan
- b) Musyawarah perencanaan pembangunan
- c) Pelaksana hasil perencanaan pembangunan
- d) Kesiediaan membayar iuran sebagai dana swadaya
- e) Kesiediaan masyarakat dalam menyumbang material seperti pasir, batu bata, semen, (Rauf, 2021)

Menurut Ndraha bentuk partisipasi masyarakat, apabila dilihat dari proses pembangunan suatu program pembangunan, mulai dari gagasan sampai pada bentuknya sebagai bangunan, maka partisipasi itu dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Partisipasi yang dilakukan sepanjang proses atau yang bisa dinamakan partisipasi profesional
2. Partisipasi yang hanya dilakukan pada satu atau beberapa fase saja, yang biasanya dinamakan partisipasi parsial, (Rahman, 2016)

Menurut Patton mengemukakan bahwa “Inisiatif atau Prakarsa dalam berpartisipasi bisa berasal dari bawah atau masyarakat itu sendiri (*bottom up*) dan berasal dari pemerintah (*top down*). Di mana dalam pembangunan desa atau kelurahan bentuk swadaya yang berupa prakarsa dan inisiatif merupakan titik awal dari partisipasi masyarakat”,(Henryk, 2013)

Sumarto mengelompokkan tingkat partisipasi masyarakat menjadi 3 bagian sebagai berikut:

- a. Tinggi
 - 1) Inisiatif datang dari masyarakat dan dilakukan secara mandiri mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan hasil pembangunan.
 - 2) Masyarakat tidak hanya ikut merumuskan program, akan tetapi juga menentukan program-program yang akan dilaksanakan.

b. Sedang

- a) Masyarakat sudah ikut berpartisipasi, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih didominasi
- b) Golongan tertentu
- c) Masyarakat dapat menyuarakan aspirasinya, akan tetapi masih terbatas pada masalah keseharian.

c. Rendah

1. Masyarakat hanya menyaksikan kegiatan proyek yang dilakukan oleh pemerintah
2. Masyarakat dapat memberikan masukan baik secara langsung atau melalui media massa, akan tetapi hanya sebagai bahan pertimbangan saja.
3. Masyarakat masih sangat bergantung kepada dana dari pihak lain sehingga apabila dana berhenti maka kegiatan secara stimulant akan terhenti juga, (Meilinawati, 2018)

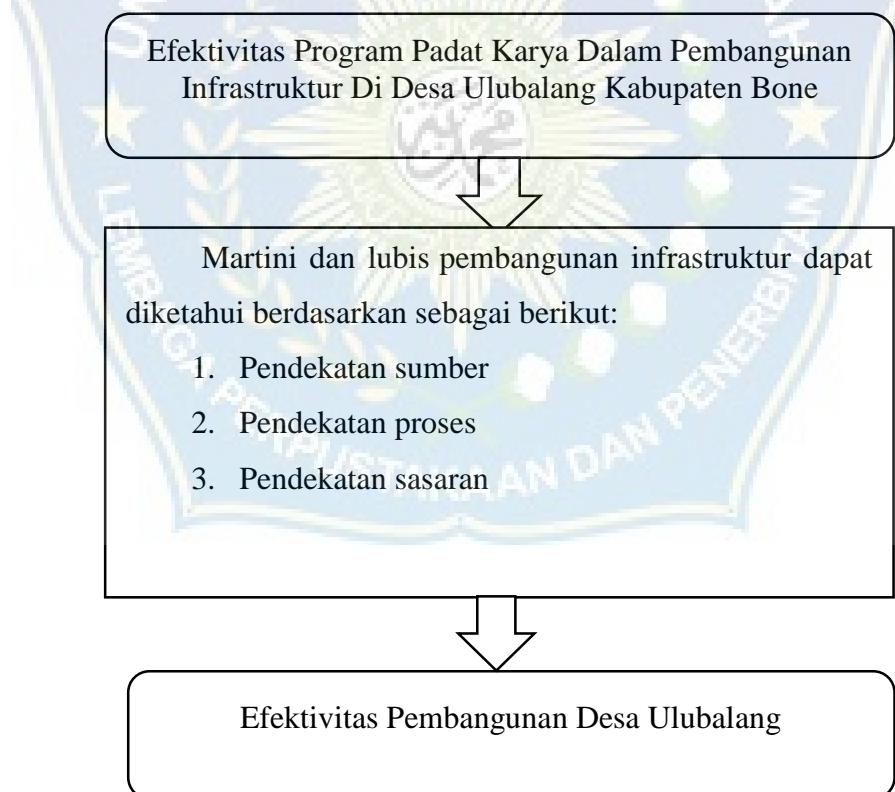
Partisipasi atau keterlibatan seluruh masyarakat di dalam upaya pemberian peran pada setiap program pembangunan dapat berupa pendapat atau ide, tenaga ataupun perasaan ikut menilai hasil program atas pembangunan tersebut.

Partisipasi masyarakat diartikan sebagai terlibatnya masyarakat dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan atas kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Keterlibatan dalam menanggung beban serta tanggungjawab pembangunan secara berkeadilan, (Miranti, 2022)

C. KERANGKA PIKIR

Penelitian ini menggunakan model efektivitas dalam pembangunan infrastruktur dari Martini dan Lubis, karena teori ini dapat digunakan sebagai acuan untuk mengukur, menggambarkan dan menerangkan efektivitas program padat karya dalam pembangunan infrastruktur di desa ulubalang kabupaten bone terbagi menjadi : pendekatan sumber (*resource approach*), pendekatan proses (*process approach*), pendekatan sasaran (*goals approach*). Teori tersebut digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2 Kerangka Pikir



D. FOKUS PENELITIAN

Adapun menjadi fokus penelitian ini adalah Efektivitas Program Padat Karya Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Ulubalang Kabupaten Bone.

E. DESKRIPSI FOKUS

1. Pendekatan Sumber

Pendekatan Sumber dalam program padat karya untuk pembangunan infrastruktur di Desa Ulubalang adalah strategi yang sangat penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Program ini berfokus pada pemanfaatan sumber daya lokal yang tersedia di desa tersebut. Dengan memanfaatkan tenaga kerja lokal, bahan baku lokal, dan keterlibatan aktif komunitas, program ini tidak hanya membangun infrastruktur yang dibutuhkan, tetapi juga menciptakan peluang kerja lokal yang berkelanjutan.

Pendekatan ini berpusat pada prinsip partisipasi masyarakat, yang memungkinkan penduduk Desa Ulubalang untuk memiliki peran aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan proyek infrastruktur. Hal ini tidak hanya memungkinkan pengembangan ekonomi yang inklusif, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan komunitas di Desa Ulubalang.

2. Pendekatan Proses

Pendekatan Proses dalam program padat karya untuk pembangunan infrastruktur di Desa Ulubalang adalah landasan utama dalam mencapai hasil yang berkelanjutan dan relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Program ini menempatkan penekanan pada perencanaan yang matang, pemantauan yang ketat, serta evaluasi berkelanjutan sepanjang tahapan pelaksanaan.

Dengan melibatkan komunitas dalam tahap perencanaan, kebutuhan dan aspirasi mereka dapat lebih baik dipahami, sehingga proyek infrastruktur dapat disesuaikan dengan tepat. Selain itu, pendekatan ini mempromosikan pelibatan aktif masyarakat dalam pelaksanaan proyek, sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap pembangunan yang terjadi di desa mereka.

Melalui proses yang terbuka dan transparan ini, program padat karya di Desa Ulubalang tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga memperkuat kapasitas dan keterlibatan komunitas dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi masa depan mereka. Dengan cara ini, pembangunan infrastruktur menjadi lebih berkelanjutan dan berdampak positif dalam jangka panjang bagi Desa Ulubalang.

3. Pendekatan Sasaran

Pedekatan Sasaran dalam Program Padat Karya dalam pembangunan infrastruktur di Desa Ulubalang merupakan sebuah inisiatif yang memiliki fokus yang sangat jelas. Pendekatan sasaran dalam program ini terutama ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa serta mengurangi tingkat pengangguran melalui pekerjaan pembangunan infrastruktur.

Dalam pelaksanaannya, program ini berusaha untuk memanfaatkan tenaga kerja lokal seoptimal mungkin, sehingga masyarakat desa dapat aktif terlibat dalam proses pembangunan. Hal ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga memperkuat rasa memiliki terhadap infrastruktur yang dibangun, sehingga berdampak positif pada keberlanjutan dan pemeliharaan infrastruktur tersebut. Dengan fokus yang kuat pada pemberdayaan masyarakat lokal, Program Padat Karya di Desa Ulubalang berperan penting dalam memajukan kesejahteraan dan perkembangan ekonomi di wilayah Desa Ulubalang.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. WAKTU DAN LOKASI PENELITIAN

Waktu penelitian dilakukan setelah seminar proposal dan dikeluarkannya surat izin penelitian. Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone. Program Padat Karya dalam pembangunan infrastruktur di Desa Ulubalang adalah sebuah inisiatif yang menjembatani kebutuhan mendesak akan pekerjaan dengan pembangunan infrastruktur yang diperlukan.

Melalui program ini, masyarakat desa diberikan peluang untuk bekerja secara sementara dalam proyek-proyek konstruksi yang beragam, seperti pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan lainnya. Program padat karya di Desa Ulubalang bukan hanya sekadar memperbaiki infrastruktur fisik, tetapi juga mengangkat taraf hidup masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan aksesibilitas, dan pembangunan sosial ekonomi di tingkat lokal. Fokus penelitian dalam hal ini bagaimana padat karya dalam pembangunan infrastruktur di Desa Ulubalang

B. JENIS DAN TIPE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam konteks program padat karya di Desa Ulubalang merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yang dimaksudkan dalam penelitian ini, memahami secara mendalam tentang

pengaruh program terhadap masyarakat lokal, kualitas infrastruktur, dan dampak sosial ekonomi, sehingga peneliti bisa mengetahui masalah dan pemahaman yang dihadapi dalam Program Padat Karya Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone.

Menurut John W. Creswell dalam buku *Research Design*, penelitian kualitatif merupakan: “Metode penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis metode untuk mendeskripsikan, mengeksplorasi dan memahami pada makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah suatu pendekatan dalam penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menguraikan, atau menjelaskan suatu fenome atau peristiwa.

Menurut nasution (2003: 5) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan, melakukan interaksi pendapat mereka mengenai dunia sekelilingnya,

C. SUMBER DATA

Sumber data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang digunakan untuk mengetahui informasi yang akan di teliti, data primer bertujuan untuk memperkaya dan mempertajam penelitian sebagai penarikan kesimpulan. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, terstruktur dan

bersifat terbuka kepada informan untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya tentang penelitian.

2. Data skunder

Data skunder adalah data yang memperjelas dan mempertajam informasi yang mendukung data primer serta memperjelas peristiwa penelitian yang dilakukan sesuai dengan judul penelitian. Data skunder juga diperoleh dengan cara menelaah dokumen resmi, data pelaksanaan program, peraturan perundang-undangan dan data lain tertulis yang relevan dengan penelitian

D. INFORMAN

Menurut moelong (2012: 132), informan adalah individu atau orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan penelitian ini untuk mencari atau data mengenai Efektivitas Program Padat Karya Dalam Pembangun Infrastruktur di Desa Ulubalang Kabupaten Bone.

Tabel 3.1 Informan

No	Informan Penelitian
1	Kepala Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko
2	Sekretaris Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko
3	Bidang Pembangunan Dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
4	Badan Pendamping Desa
5	Ketua Dusun Desa Ulubalang
6	Masyarakat Desa Ulubalang

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

1. Observasi

Menurut Kartono, Observasi yakni ialah studi yang dilakukan dengan sistematis mengenai fenomena atau kejadian sosial serta gejala-gejala psikis dengan cara pengamatan dan pencatatan.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi yang penting dalam mendapatkan informasi atau pemahaman lebih dalam tentang suatu topik atau individu. Selain itu, wawancara juga merupakan alat yang efektif untuk mengumpulkan data kualitatif, seperti pendapat atau persepsi seseorang terhadap suatu isu.

Dalam situasi formal, wawancara sering digunakan dalam proses seleksi pekerjaan, penelitian akademik, atau untuk membuat profil pribadi. wawancara merupakan cara yang berharga untuk memahami sudut pandang dan pengalaman individu, serta mempromosikan pertukaran informasi yang penting dalam berbagai konteks.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah langkah penting dalam mencatat dan menyimpan informasi yang berharga. Proses ini melibatkan pengumpulan, pencatatan, dan penyimpanan data atau informasi dalam berbagai bentuk, seperti teks, gambar, atau rekaman audio.

Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan cara mendokumentasikan hal-hal yang berkaitan dengan wawancara, observasi dan lain-lain.

F. TEKNIS ANALISIS DATA

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu, sebagaimana yang telah di kemukakan dalam (Rijali, 2019) yaitu: Data pengumpulan, data reduksi (*data reductino*), penyajian data (*data display*), dan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*).

penelitian atau analisis data, proses ini membantu peneliti atau pengambil keputusan untuk mengambil langkah selanjutnya berdasarkan wawasan yang diperoleh dari data yang telah diolah. Kesimpulan ini memainkan peran kunci dalam mengarahkan tindakan atau kebijakan yang akan diambil dalam konteks penelitian atau analisis data tersebut.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambar umum lokasi penelitian meliputi gambaran umum daerah Kabupaten Bone dan gambaran umum objek penelitian yaitu Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko.

1. Gambaran Umum Kabupaten Bone

Kabupaten bone merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibukotanya Watampone. Kabupaten ini memiliki beragam potensi sumber daya alam, seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan. Selain itu, keberagaman budaya dan sejarah juga menjadi bagian penting dari identitas kabupaten bone. Kabupaten Bone memiliki luas sekitar 4.559 km² atau 9,78% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan.

Secara geografis kabupaten bone berbatasan dengan wilayah-wilayah berikut :

Utara : Kabupaten Wajo dan Soppeng

Timur : Teluk Bone

Selatan : Kabupaten Sinjai dan Gowa

Barat : Kabupaten Maros, Pangkep Barru

Secara astronomis Kabupaten Bone terletak pada posisi 4°13" – 5°6" Lintang Selatan dan antara 119°42"-120°30" Bujur Timur. Letaknya yang dekat dengan garis khatulistiwa menjadikan Kabupaten Bone beriklim tropis.

Wilayah Kabupaten Bone terbagi menjadi dua tipe hujan: tipe hujan Monsoon dan tipe hujan lokal. Tipe hujan Monsoon memiliki curah hujan tertinggi saat bertiup angin monsun Asia yaitu bulan Januari dan Februari. Tipe ini mencakup wilayah Kabupaten Bone bagian barat. Tipe kedua memiliki kriteria pola hujan terbalik dengan pola monsoon, yaitu curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Mei-Juni. Tipe ini mencakup sebagian besar wilayah Kabupaten Bone.

2. Luas wilayah dan administratif kabupaten bone

Kabupaten bone sebagai salah satu wilayah yang berada di pesisir timur sulawesi selatan memiliki posisi strategis dalam perdagangan barang dan jasa dikawasan timur indonesia yang secara administratif, kabupaten bone terdiri dari 27 kecamatan, 328 desa dan 44 kelurahan. Wilayah Kabupaten Bone berada di arah timur Kota Makassar dengan jarak sejauh 174 km. Posisinya berada pada posisi 4°13'- 5°6' LS dan antara 119°42'-120°30' BT. Luas wilayah Kabupaten Bone 4.559 km² dengan rincian lahan sebagai berikut

Persawahan	: 88.449 Ha
Tegalan/Ladang	: 120.524 Ha
Tambak/Empang	: 11.148 Ha
Perkebunan Negara/Swasta	: 43.052,97 Ha
Hutan	: 145.073 Ha
Padang rumput dan lainnya	: 10.503,48 Ha

Luas wilayah Kabupaten Bone sekitar 4.559 km² atau 9,78 persen luas Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah yang besar ini terbagi menjadi 27 kecamatan dan 372 desa/kelurahan. Berikut rincian luas wilayah masing-masing kecamatan dapat dilihat pada berikut.

Tabel 3.2 Luas Wilayah Kabupaten Bone

NO	NAMA KECAMATAN	LUAS (KM ²)	PERSENTASE
1	SALOMEKKO	84,91	1,86
2	TONRA	200,32	4,39
3	MARE	263,50	5,78
4	CINA	147,50	3,24
5	AWANGPONE	110,70	2,43
6	AJANGALE	139,00	3,05
7	AMALI	119,13	2,61
8	BAREBBO	114,20	2,50
9	BENGO	164,00	3,60
10	BONTOCANI	463,35	10,16
11	CENRANA	143,60	3,15
12	TANETE RIATTANG	23,79	0,52
13	TANETE RIATTANG TIMUR	48,88	1,07
14	TANETE RIATTANG BARAT	53,68	1,18
15	DUA BOCCOE	144,90	3,18
16	KAHU	189,50	4,16
17	LIBURENG	344,25	7,55
18	LAMURU	208,00	4,56
19	LAPPARIAJA	138,00	3,03
20	PALAKKA	115,32	2,53
21	PATIMPENG	130,47	2,86
22	PONRE	293,00	6,43
23	SIBULUE	155,80	3,42
24	TELLU LIMPOE	318,10	6,98
25	TELLU SIATTINGE	159,30	3,49
26	ULAWENG	161,67	3,55
27	KAJUARA	124,13	2,72
	KABUPATEN BONE	4.559,00	100,00

3. Visi Misi Kabupaten Bone

VISI

MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA

Mandiri : kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerja sama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.

Berdaya Saing : mengandung makna terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif dan kompetitif yang berbasis sumber daya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional bahkan internasional.

Sejahtera : mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik.

MISI

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- b. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- c. Meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya.
- d. Mengotimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
- e. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
- f. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

4. Gambaran Umum Desa Ulubalang

Desa Ulubalang merupakan salah satu desa dari 7 desa dan 1 kelurahan yang ada di Kecamatan Salomekko yang terletak 3 km dari ibukota Kecamatan dan 68 km dari ibukota Kabupaten Bone.

Desa Ulubalang secara administratif terbagi menjadi kedalam 4 dusun dan 8 RT. Dusun terluas adalah dusun samaenre yait dengan luas 3,35 km², sedangkan dusun dengan wilayah terkecil adalah dusun tanah cellae yaitu seluas 2,1 km². Desa Ulubalang terletak pada posisi 68 km dari arah ibukota

Kabupaten Bone, 8 km dari garis pantai teluk bone, 18 km arah selatan Kabupaten Sinjai.

Luas wilayah Desa Ulubalang sekitar 9,8 km². Adapun batas-batas wilayah Desa Ulubalang sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Bicoing Kecamatan Tonra

Sebelah Selatan : Desa Tebba Kecamatan Salomekko

Sebelah Timur : Kelurahan Pancaitana Kecamatan Salomekko

Sebelah Barat : Desa Gattareng Kecamatan Salomekko.

Desa Ulubalang memiliki iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Hal ini menjadi faktor utama yang menjadikan Desa Ulubalang sebagai daerah yang sangat potensi pada bidang pertanian.

Tipografi dengan bentangan wilayah datar sampai berbukit, luas wilayah Desa Ulubalang 9,8 km² yang terdiri dari :

Tanah Sawah : 740 ha

Tanah Keringan : 150,75 ha

Tanah Perkuburan : 700 M²

Tanah Perkebunan : 20 ha

Kawasan Hutan : +500 ha

Perkantoran : 7 ha

Desa Ulubalang di tinjau dari ketinggian tempat dapat diklasifikasikan kedalam lima kategori dengan variasi ketinggian antara lain.

Tabe 3.3 Ketinggian Wilayah Dusun

No	Dusun	Ketinggian Wilayah (Meter dpal)
1	Balange	0 – 100
2	Tanah Cellae	25 – 100
3	Samaenre	0 – 250
4	Labukku	0 – 500

Berdasarkan administratif wilayah Desa Ulubalang terdiri atas 4 dusun dan 8 RT yaitu Dusun Balange 2 RT, Dusun Tanah Cellae 2 RT, Dusun Samaenre 2 RT, Dusun Labukku 2 RT. Jumlah penduduk yang secara administarsi, jumlah total 3.103 jiwa dengan rincian penduduk berjenis laki-laki berjumlah 1.362 jiwa, sedangkan berjenis perempuan berjumlah 1.741 jiwa.

5. Visi Dan Misi Desa Ulubalang

VISI

DESA ULUBALANG YANG AMAN, RELIGIUS, MANDIRI DAN TERTIB KEPENDUDUKAN

Aman : meningkatnya keamanan nelalui pembinaan ketertiban, keamanan dan pencegahan, pencurian, perkelahian, dan konflik kepemilikan lahan.

Regilius : meningkatnya kehidupan beragam sejak dini dan pembangunan karakter generasi muda.

Mandiri : meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa melalui Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur, Pemberdayaan Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perdagangan/Wirausaha, Koperasi Dan Badan Usaha Milik Desa

Tertib Kependudukan : pelayanan cepat tangap catatan kependudukan secara terintegrasi.

MISI

- a. Reformasi tata kelola pemerintah desa
- b. Meningkatkan kegiatan kepemudaan, sarana dan prasarana olahraga, serta keamanan lingkungan
- c. Meningkatkan ketertiban kepemilikan/penguasaan lahan dan pendataan objek pajak
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan usia dini dan sarana dan prasarana kesehatan serta pola hidup sehat
- e. Meningkatkan kemandirian ekonomi melalui pembinaan koperasi UMKM, ekonomi kreatif, dan pembangunan akses jalan tani, jalan lingkungan, jalan kebun, jembatan, jalan pemukiman yang beraspal, serta sarana infrastruktur pertanian lainnya
- f. Meningkatkan penyediaan air bersih untuk rumah tangga dan permandian umum dan pasar desa

6. Uraian Tugas Dan Fungsi Pengelolaan Desa

a. Kepala Desa

1. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan RI.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
4. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari KKN.
6. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintah desa.
7. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
8. Menyelenggarakan administrasi desa dengan baik.
9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa.
10. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
11. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa yang dapat di bantu oleh lembaga adat desa
12. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
13. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat.
14. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.

15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
16. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada bupati/walikota. Memberikan laporan kepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat.
17. Laporan penyelenggaraan pemerintah desa di sampaikan kepada bupati/walikota melalui camat satu kali dalam satu tahun.
18. Laporan pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan dalam satu kali satu tahun dalam masyarakat BPD.
19. Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa atau radio komunitasnya.
20. Laporan masa akhir jabatannya kepala desa di sampaikan kepada bupati/walikota melalui kecamatan dan kepada BPD.

b. Sekretaris Desa

1. Memberikan saran dan pendapat kepada kepala desa.
2. Memimpin, mengordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur/kegiatan kesekretariatan desa.
3. Memberikan informasi mengenai keadaan kesekretaris desa dan keadaan umum desa.
4. Merumuskan program kegiatan kepada kepala desa.
5. Melaksanakan unsur surat menyurat kearifan dan laporan.

6. Mengadakan dan melaksanakan pengarsipan rapat dan catatan hasil-hasil rapat.
7. Menyusun rancangan anggaran penerimaan dan belanja desa.
8. Mengadakan kegiatan anggaran penerimaan dan belanja desa.
9. Melaksanakan kegiatan pencatatan mutasi tanah dan pencatatan administrasi pemerintahan.
10. Melaksanakan administrasi kependudukan, administrasi pembangunan, administrasi kemasyarakatan.
11. Melaksanakan tugas yang lain yang diberikan oleh kepala desa.

c. Kepala Urusan Pembangunan

1. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan desa.
2. Melaksanakan pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan desa.
3. Menghimpun data potensi desa serta menganalisis dan memeliharanya untuk di kembangkan.
4. Melaksanakan pencatatan dan mempersiapkan bahan guna pembuatan daftar usulan serta mencatatat daftar isian proyek/daftra isian kegaiatan.

d. Bidang pendamping desa

1. Melakukan pendampingan dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pembangunan desa yang berskala lokal desa, kerja sama antar desa, dan kerja sama desa dengan pihak ketiga
2. Mempercepat pengadministrasikan di tingkat kecamatan terkait penyaluran, perencanaan, pemanfaatan, dan rekaputilasi pelaporan dana desa
3. Melakukan sosialisasi kebijakan SDGS desa
4. Mentoring pendamping lokal desa dan KPMD
5. Terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari di desa dan kecamatan yang berkaitan dengan fasilitas implementasi SDGS desa, kerja sama antar desa, dan kerja sama antar desa dengan pihak ketiga kedalam aplikasi laporan harian dalam sistem informasi desa.

e. Kepala Urusan Umum

1. Melaksanakan, menerima dan mengendalikan surat-surat desa mempunyai tugas keluar serta melaksanakan tata kearsipan.
2. Melaksanakan penyediaan, penyimpanan, dan pendistribusian alat-alat kantor, pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor.
3. Menyusun jadwal serta mengikuti perkembangan pelaksanaan piket.

4. Melaksanakan dan mengusahakan dan keteriban dan kebersihan kantor dan bangunan lain milik desa.
5. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum.
6. Mencatat inventarisasi kekayaan desa.
7. Melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat dan penerimaan tamu dinas serta kerumahtanggaan pada umumnya.
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

B. PENYAJIAN HASIL DATA PENELITIAN

Penyajian data dalam penelitian efektivitas program padat karya dalam pembangunan infrastruktur di desa ulubalang kabupaten bone di peroleh dari observasi dan wawancara. Wawancara berupa tanya jawab langsung antara peneliti dengan informan serta dokumen yang menunjang penelitian ini, sedangkan observasi yaitu peneliti mencari data langsung di lapangan.

Peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan Kepala Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko, Sekretaris Desa, Bidang Pembangunan Dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Badan Pendamping Desa, Kepala Dusun Samaenre, dan Masyarakat Desa. Terpilihnya nama-nama tersebut sebagai informan dalam penelitian ini, karena peneliti ini melihat bahwa informan-informan tersebut memiliki kapabilitias dalam memberikan jawaban tentang penelitian ini penyajian data yang di uraikan berdasarkan hasil wawancara dari informan di lokasi dan tempat yang berbeda, yang selanjutnya direduksi berdasarkan data yang di peroleh.

Penelitian ini dinilai berdasarkan dari teori Martini dan Lubis yang digunakan sebagai landasan teori untuk mengukur Efektivitas Program Padat Karya Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Ulubalang Kabupaten Bone yang mengemukakan bahwa ada tiga faktor keberhasilan efektivitas padat karya antara lain : pendekatan sumber, pendekatan proses, pendekatan sasaran. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan secara terperinci sebagai berikut:

a. Pendekatan sumber

1. Sumber daya manusia

Pendekatan sumber dalam efektivitas program padat karya dalam pembangunan infrastruktur di desa ulubalang sangat penting dalam menentukan hasil dari padat karya. Program padat karya desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa ulubalang sangat efektif yang ditetapkan oleh pemerintah kota yang sesuai dengan peraturan yang ada.

Pembangunan Sumber Daya Manusia bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, agar masyarakat mempunyai keterampilan dan pengetahuan untuk mengelolah setiap potensi yang ada di desa ulubalang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa ulubalang bapak Haeril, SE, M.Si (wawancara pada 3 Januari 2024) mengatakan bahwa:

“untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam program padat karya dalam pembangunan jalan atau jembatan sangat efektif karna pemerintah desa ulubalang telah melaksanakan dan sudah banyak yang meneliti terkait padat karya”

Program padat karya dilakukan pemerintah sangat baik mengingat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan sangat berpengaruh dalam padat karya. Hasil wawancara dengan bapak Mursalim S.Pd (wawancara 5 Januari 2024) mengatakan bahwa:

“Pembangunan desa dalam sumber daya manusia cukup memadai, baik dari kemampuan masyarakat desa dalam program pembangunan di desa. Sumber daya manusia sangat melibatkan masyarakat desa ulubalang, karna mengingat masyarakat desa ulubalang banyak yang ahli dalam pembangunan seperti jalan, jembatan, pengerasan jalan tani dan lain-lain”

Dalam program padat karya yang dilakukan pemerintah desa sangat begitu baik, mengingat pembangunan desa meningkatkan akses perekonomian desa. Hasil wawancara dengan Andi Satmawati (wawancara 7 januari 2024) mengatakan bahwa:

“Sumber daya manusia dalam program pembangunan sangat meningkat mengingat partisipasi masyarakat ikut sertakan dirinya untuk membangun jalan dan jembatan dalam progrma padat karya”

Sejalan dengan hasil wawancara dengan Andi Faisal (wawancara 8 januari 2024) mengatakan bahwa:

“Sumber daya manusia dalam program padat karya pemerintah sangat mendukung dan sangat terbuka pada saat ada program kegiatan-kegiatan pembangunan desa, baik dari keuangan maupun dari pekerja-pekerjaan yang ada di desa ulubalang”

Program padat karya dalam pembangunan jalan atau jembatan sangat melibatkan masyarakat desa dalam pembangunan. Hasil wawancara dengan Taufik (wawancara 11 januari 2024) mengatakan bahwa:

“Sumber daya manusia yang digunakan dalam pembangunan desa berjalan dengan baik. Masyarakat berperan aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan desa, oleh karena itu padat karya desa yang dilakukan oleh kelompok masyarakat, baik kelompok pemuda atau kelompok tani”

Program yang dikeluarkan oleh pemerintah desa dalam program padat karya sangat berpengaruh terhadap masyarakat karna dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Hasil wawancara dengan Ukka (wawancara 14 januari 2024) mengatakan bahwa:

“Sumber daya manusia yang digunakan dalam pembangunan padat karya desa bersumber dari ADD (anggaran dana desa) dilaksanakan oleh masyarakat dan terdapat pendapatan dari program pembangunan yang dilaksanakan karna dilibatkan masyarakat setempat dalam pembangunan jalan atau jembatan”

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dilapangan bahwa sumber daya manusia sangat memadai dalam pembangunan desa mengingat masyarakat berperan aktif dalam berpartisipasi dalam pembangunan desa. Sumber daya manusia dalam program padat karya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pembangunan desa.

2. Sumber landasan atau aturan padat karya

Padat karya memerlukan landasan atau aturan untuk memastikan pembangunan berjalan efisien dan sesuai dengan standar keamanan serta kualitas yang ditetapkan. Landasan tersebut mencakup perencanaan yang matang, penggunaan teknik konstruksi yang tepat, serta pemenuhan regulasi

dan norma yang berlaku. Program padat karya dalam pembangunan infrastruktur dapat mengukur keberhasilan dan membuat perbaikan yang di perlukan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa ulubalang bapak Haeril, SE, M.Si (wawancara pada 3 Januari 2024) mengatakan bahwa:

“UUD NO 6 tahun 2014 tentang desa , PP 47 2014 tentang pelaksanaan desa, Pendagri tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa , peraturan mentri desa dan banyak peraturan mentri desa karna setiap tahun berubah”

Program padat karya yang terlaksana dengan baik memerlukan perencanaan agar pembangunan infrastruktur terdand aturan yang lebih terealisasikan dengan baik. hasil wawancara dengan bapak Mursalim S.Pd (wawancara 4 Januari 2019) mengatakan bahwa:

“Terkait dengan regulasi atau Undang-Undang mengenai program padat karya. Pemerintah mengikuti sumber dari aturan Undang-Undang terkait dengan padat karya dalam pembangunan yang petunjuk regulasi yang dianjurkan oleh Kementerian Kabupaten dan Kementerian Desa, pemerintah desa berpatokan semua baik itu dengan Kementerian Keuangan Desa atau regulasi-regulasi yang pemerintah desa menjadi pedoman bagi desa”

Sejalan dengan hasil wawancara dengan Andi Satmawati (wawancara 7 januari 2024) mengatakan bahwa:

“Dalam program padat karya pemerintah desa berpedoman terhadap Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh kementerian kabupaten dan Kementerian Desa”

Dalam pembangunan memerlukan anggaran yang sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku. Anggaran diperlukan untuk memastikan penggunaan dana yang efisien dan transparan selama proses pembangunan. Hasil wawancara dengan Andi Faisal (wawancara 8 januari 2024) mengatakan bahwa:

“Sumber aturan atau landasan padat karya dalam pembangunan desa, yaitu bersumber dari APD (anggaran pendapatan desa) sehingga pemerintah desa ulubalang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan desa ulubalang”

Program padat karya dalam pembangunan desa bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan memperbaiki infrastruktur lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek untuk memastikan pemenuhan kebutuhan masyarakat. hasil wawancara dengan bapak Taufik (wawancara 11 januari 2024) mengatakan bahwa:

“Sumber aturannya dalam perencanaan pembangunan diawali dengan musrembang serta disesuaikan dengan APBD (anggaran pendapatn belanja desa) guna melancarkan pembangunan desa”

Sejalan dengan hasil wawancara dengan Ukka (wawancara 11 januari 2024) mengatakan bahwa:

“Sebelum melakukan pembangunan diadakan dengan musrembang kemudian diadakan rapat penetapan pembangunan jalan didusun tersebut, bersumber dari aturan mentri desa dalam melaksanakan pembangunan”

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dilapangan bahwa sumber aturan atau landasan pada padat karya bersumber pada undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa, pp 47 tahun 2014 tentang pelaksanaan desa, pendagri tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa. Dengan adanya sumber aturan yang mengatur pembangunan dalam padat karya dapat terealisasikan dengan baik.

3. Partisipasi masyarakat

partisipasi masyarakat dalam program padat karya memiliki peran penting dalam keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan desa. Masyarakat dapat berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan prioritas di desa dengan terlibat dalam tahap perencanaan, masyarakat dapat memberikan pandangan dan saran yang berharga untuk memastikan proyek sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

partisipasi langsung dalam pekerjaan padat karya, masyarakat tidak hanya mendapatkan manfaat ekonomi melalui upah, tetapi juga merasakan kepemilikan terhadap proyek pembangunan.

Masyarakat dapat berperan dalam pengawasan dan pemantauan pembangunan untuk memastikan bahwa pekerjaan di lakukan sesuai dengan standar kualitas dan waktu yang di tentukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Kepala Desa ulubalang bapak Haeril, SE, M.Si (wawancara pada 3 Januari 2019) mengatakan bahwa:

“Padat karya pasti masyarakat berperan karna yang dimaksud padat karya itu masyarakat yang menjadi objek pelaksana pembangunan, pelaksana pekerjaan. Masyarakat dapat menyediakan sumber daya lokal, seperti tenaga kerja dan bahkan baku, yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat”

Partisipasi dalam program padat karya, masyarakat dapat mengalami peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan akses terhadap pekerjaan, pendapatan, dan infrastruktur. Hasil wawancara bapak Mursalim S.Pd (wawancara 5 Januari 2024) mengatakan bahwa:

“Terkait dengan peranan masyarakat dalam ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan yang diarahkan oleh pemerintah desa sangat direspon oleh masyarakat desa dan terkait pembangunan menggunakan padat karya dapat memperdayakan masyarakat desa lebih lagi terkait pembangunan yang dilaksanakan usulan dari masyarakat itu sendiri. misal pembangunan akan dilaksanakan didusun tersebut maka dusun lain ikut membantu pembangunan tersebut jika dusun tersebut tidak sanggup menganangi masalah tersebut”

Sejalan dengan wawancara dengan Andi Satmawati (wawancara 7 januari 2024) mengatakan bahwa:

“Peran masyarakat dalam pembangunan jalan dan jembatan sangat ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan program padat karya, karna pembangunan desa yang mengusulakn masyarakat itu sendiri”

Partisipasi aktif masyarakat tidak hanya mendukung keberhasilan pembangunan desa, tetapi juga memperkuat keterlibatan dan tanggung jawab bersama dalam meningkatkan kondisi hidup wilayah desa ulubalang. Hasil wawancara dengan Andi Faisal (wawancara 8 januari 2024) mengatakan bahwa:

“Masyarakat sangat ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan desa ulubalang karna tidak ada yang dilibatkan dalam pembangunan desa kecuali masyarakat setempat. Mengingat masyarakat ahli dalam bidang pembangunan jalan dan jembatan”

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah langkah yang penting untuk memastikan keberlanjutan, memberikan peluang bagi masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hasil wawancara dengan Taufik (wawancara 11 januari 2024) mengatakan bahwa:

“Masyarakat peran aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan padat karya di desa karena semua padat karya dilakukan dengan kelompok masyarakat baik kelompok pemuda atau kelompok tani, dimana pembangunan jalan atau jembatan dapat mempermudah akses perekonomian masyarakat desa”

Partisipasi masyarakat pada kelompok tani dapat berperan dalam pengelolaan yang berkelanjutan terhadap sumber daya alam dan memungkinkan para petani untuk mengakses lahan lebih efektif dan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih baik. Hasil wawancara dengan Ukka (wawancara 14 januari 2024) mengatakan bahwa:

“Partisipasi masyarakat dalam pembangunan jalan mengadakan rapat dan bahkan biasanya masyarakat desa memberikan tanahnya dalam pembuatan jalan atau jembatan untuk mempermudah masyarakat itu sendiri untuk mempermudah akses pergi kelahan atau kebunnya”

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data dalam pembangunan pada padat karya bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat berperan aktif. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan baik kelompok pemuda dan kelompok tani yang ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan jalan dan jembatan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan desa dalam program padat karya.

Berdasarkan hasil wawancara terkait sumber daya manusia, sumber aturan atau landasan dan partisipasi masyarakat dapat disimpulkan dalam program padat karya dalam pembangunan infrastruktur di desa ulubalang dengan mengintegrasikan sumber daya manusia yang terampil, mengikuti landasan hukum yang berlaku dan mendorong partisipasi aktif masyarakat. Program padat karya dapat menjadi instrumen yang efektif dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga membangun kapasitas lokal, meningkatkan perekonomian masyarakat dan mempermudah akses masyarakat desa ulubalang.

b. Pendekatan proses

1. Proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan

Proses perencanaan padat karya dalam pembangunan mengacu pada pendekatan yang menekankan penggunaan tenaga kerja masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan masyarakat setempat. Proses perencanaan padat karya ini bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya memberikan manfaat infrastruktur fisik tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan.

Dalam proses perencanaan Pelaksanaan padat karya dalam pembangunan melibatkan implementasi dari rencana yang telah disusun sebelumnya. Proses pelaksanaan memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat setempat.

Proses pelaporan padat karya dalam pembangunan sangat penting untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan memberikan informasi kepada berbagai pihak terkait. proses pelaporan padat karya dapat menjadi alat yang efektif dalam memantau, mengevaluasi, dan memperbaiki pelaksanaan proyek pembangunan.

Transparansi dan akuntabilitas melalui pelaporan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap pembangunan yang dilaksanakan. Berdasarkan wawancara dengan bapak Haeril SE, M.Si (wawancara 3 Januari 2024) mengatakan bahwa:

“Untuk melaksanakan pembangunan, misal dalam pembangunan jalan melakukan proses yang dilakukan musrembang dusun, musrembang desa, musrembang kecamatan dan musrembang kabupaten, pelaksanaan pembangunan itu sudah pasti, karena apa yang direncanakan dalam rapat tersebut itulah yang di kerjakan. Oleh karena itu pemerintah desa ulubalang melakukan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan evaluasi, yaitu Perencanaan (musrembang), Pelaksanaan (pelaksanaan pembangunan dan pekerjaan), Penatausahaan (pembuatan laporan tentang apa yang dilaksanakan), Evaluasi (pelaporan)”

perencanaan yang matang adalah kunci kesuksesan dalam pelaksanaan pembangunan. Proses/alur pelaksanaan pembangunan yang baik harus melibatkan langkah-langkah perencanaan yang cermat untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan proyek. Perencanaan yang matang membantu mengidentifikasi risiko, mengelola sumber daya dengan efisien, dan memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan visi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain itu, melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat dalam proses perencanaan dapat meningkatkan pembangunan yang lebih baik. Hasil wawancara dengan bapak Mursalin S.Pd (wawancara 5 Januari 2024) mengatakan bahwa:

“awal perencanaan pembangunan itu diadakan musyawarah dusun dengan melibatkan masyarakat atau toko-toko masyarakat dan apa yang menjadi perencanaan pembangunan desa yang sangat mendesak, setelah musyawarah dusun langsung musyawarah desa, setiap dusun memaparkan apa yang menjadi kendala tersebut. misal kendala dalam pembangunan jalan dan jembatan notulen akan menyimpulkan bahwa pembangunan yang akan dilaksanakan pembangunan didusun tersebut, walaupun setiap dusun mengusulkan pembangunan. Keputusan desa akan menetapkan pembangunan jalan dan jembatan dengan usulan yang tepat dan dengan pertimbangan personal”

Sejalan dengan wawancara Andi Satmawati (wawancara 7 januari 2024) mengatakan bahwa:

“Proses perencanaan pembangunan dilakukan musyawarah dengan masyarakat, dan pemerintah desa melakukan musyawarah dalam penetapan pembangunan desa yang akan dilaksanakan pembangunan. Sistem pelaporan dan penanggung jawabnya kadus dan tukang pembangunan sebagai penanggung jawab pembangunan yang sedang berjalan”

Dalam pembangunan jalan dan jembatan memerlukan penyusunan perencanaan untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik. proses perencanaan dan penetapan anggaran atau lokasi sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan rencana pembangunan. Hasil wawancara dengan Andi Faisal (wawancara 8 januari 2024) mengatakan bahwa:

“Proses perencanaan melakukan pertemuan rapat tentang perencanaan APBD (anggaran pendapatan belanja desa) sehingga ada persetujuan BPD (badan pendamping desa) dan kepala desa dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Ulubalang”

Pelaksanaan pembangunan memerlukan manajemen yang efektif, koordinasi yang baik, dan pemantauan yang cermat untuk memastikan bahwa pembanguna berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Hasil wawancara dengan Taufik (wawancara 11 januari 2024) mengatakan bahwa:

“Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan diadakan musremabng dalam rapat musyawarah setiap perwakilan dusun melaporkan atau rencana kegiatan dusun masing-masing dan dilaporkan di perencanaan pembangunan desa, kemudian sistem pertanggung jawaban padat karya dalam pembangunan keningkat pengawasan pembangunan dari kabupaten”

Sistem pengawasan dalam proses pelaksanaan pembangunan adalah langkah penting untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan rencana, anggaran, dan standar yang telah ditetapkan. Hasil wawancara dengan Ukka (wawancara 14 januari 2024) mengatakan bahwa:

“Prosedurnya diadakan dengan rapat musrembang, dilanjutkan dengan rapat penetapan dan waktu pelaksana yang akan ditetapkan. Sistem pelaporan ditanganin oleh TPK (tim pengelola kegiatan) dan apabila pemeriksaan dari kabupaten TPK menyampaikan kondisi pembangunan yang telah dilaksanakan, TPK diberikan wewenang dari pemerintah desa untuk menanganin pembangunan yang dilaksanakan”.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dilapangan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan dalam pembangunan jalan, pengerasan jalan, jembatan dan lain-lain. Proses perencanaan dan pelaksanaan serta pelaporan memerlukan penyusunan perencanaan dan penetapan pada pembangunan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.

2. Keterlibatan masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam program padat karya dalam pembangunan sangat penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunank, menciptakan dampak positif, dan meningkatkan pemberdayaan lokal. Partisipasi masyarakat dapat memperkuat pelaksanaan program dan memastikan bahwa kebutuhan serta aspirasi lokal diperhitungkan.

Keterlibatan masyarakat dalam ikut berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dengan keterlibatan masyarakat yang kuat, program padat karya dapat menjadi alat yang efektif untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan keterampilan, dan memberdayakan masyarakat setempat dalam proses pembangunan. Berdasarkan wawancara dengan bapak Haeril SE, M.Si (wawancara 3 Januari 2024) mengatakan bahwa:

“Padat karya itu dipekerjakan orang berdasarkan dengan jumlah uang, misalnya kita mau bangun jembatan anggarannya 100 jt, dalam 100 jt itu gaji padat karyanya 30% dan 70% dana pembangunan, 30 jt, itu yang dibagi berapa minggu dia kerja, berapa hari dia kerja jadi tidak mungkin melibatkan semua orang karna dimana mau di ambilkan gajinya 30 jt tapi berbeda dengan siapa mau yang bekerja karna di undang jadi partisipasi masyarakat tidak melibatkan semua, namun hanya dusun tertentu”

keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sangat penting dan memberikan banyak manfaat. Pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan, memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi lokal diperhitungkan, serta memperkuat partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Hasil wawancara dengan bapak Mursalin S.Pd (wawancara 5 Januari 2024) mengatakan bahwa:

“melibatkan masyarakat dalam pembangunan program padat karya hanya wilayah tertentu dan memenuhi HOK (hari ongkos kerja), misal pembangunan jalan digunakan dana sekitar 50 jt dan untuk padat karya 20 jt dari 50 jt tersebut”

Masyarakat lokal memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh komunitas mereka. Keterlibatan mereka membantu mendapatkan wawasan yang lebih baik dalam merencanakan dan melaksanakan proyek. Hasil wawancara dengan Andi Satmawati (wawancara 7 Januari 2024) mengatakan bahwa:

“Pembangunan jalan, jembatan dan pengerasan jalan tani tidak melibatkan semua masyarakat desa ulubalang, misal pembangunan jalan di dusun samaenre hanya masyarakat tersebut ikut berpartisipasi dalam pembangunan”

Masyarakat lokal dapat memberikan ide kreatif dan solusi inovatif untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Partisipasi masyarakat meningkatkan keragaman perspektif dan membuka peluang untuk inovasi. Hasil wawancara dengan Andi Faisal (wawancara 8 Januari 2024) mengatakan bahwa:

“Mengetahui keterlibatan masyarakat desa ulubalang dalam pembangunan itu Melibatkan semua masyarakat desa yang ingin bekerja”

Sejalan dengan wawancara Taufik (wawancara 11 januari 2024)

mengatakan bahwa:

“pembangunan dalam program padat karya melibatkan semua masyarakat, baik itu kelompok pemuda, kelompok tani dan tokoh-tokoh agama atau semua yang terkait dengan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa”

Pembangunan yang melibatkan masyarakat lokal dalam proses pembangunan lebih cenderung menciptakan dampak positif yang berkelanjutan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil wawancara dengan Ukka (wawancara 14 januari 2024) mengatakan bahwa:

“Dalam pembangunan jalan tidak melibatkan semua masyarakat desa, misalnya dalam pembangunan jembatan hanya dusun tersebut ikut berpartisipasi dalam pembangunan tersebut, namun jika ada dusun lain ikut membantu dalam pembangunan yang dilaksanakan dan belum memenuhi syarat, maka masyarakat tersebut bisa bergabung dalam pembangua tersebut”

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dilapangan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembangunan melalui program padat karya. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dapat memberikan ide dan solusi untuk memecahkan masalah pembangunan yang akan dilaksanakan. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan program padat karya dapat memberikan dampak positif untuk pembangunan jalan dan jembatan yang dilaksanakan.

3. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan dalam pembangunan melibatkan proses perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Penyesuaian perencanaan pembangunan menjadi penting ketika terjadi perubahan kondisi atau kebutuhan selama pelaksanaan pembangunan. Proses ini melibatkan evaluasi ulang tujuan, anggaran, dan jadwal, serta penyesuaian untuk mengatasi perubahan. Berdasarkan wawancara dengan Haeril, SE, M.Si (wawancara 3 Januari 2024) mengatakan bahwa:

“Sesuai dengan perencanaan karna apa yang direncanakan itu yang dilaksanakan, misalnya menetapkan apa yang mau di kerja, dusun ini apa mau di kerja dan dusun itu apa mau dikerja setelah ada uangnya apa yang direncanakan itulah yang di kerjakan, karna mana mungkin sudah di rencanakan baru lain di kerja, karna tidak ada pembangunan yang berjalan jika tidak ada perencanaan”

Pembangunan yang direncanakan dalam mengambil keputusan bersama yang dihasilkan dari musyawarah dapat memperkuat dukungan masyarakat dan menciptakan landasan yang kuat untuk keberhasilan pembangunan. Hasil wawancara dengan bapak Mursalin S.Pd (wawancara 5 Januari 2024) mengatakan bahwa:

“Dalam proses pembangunan tentu sesuai dengan yang dilakukan karna musyawarah dusun ke musyawarah desa timbulnya perencanaan pembangunan dan perencanaan yang dilakukan dikakulasi dari anggaran dana desa dengan usulan-usulan masyarakat”

Sejalan dengan wawancara Andi Satmawati (wawancara 7 januari 2024) mengatakan bahwa:

“Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sangat sesuai dengan perencanaan pembangunan, karna musyawarah yang dilakukan pemerintah desa dan masyarakat yang disetujui itu yang dilaksanakan”

Partisipasi masyarakat adalah kunci dalam perencanaan pembangunan.

Proses partisipasi melibatkan penduduk setempat dalam pengambilan keputusan. Hasil wawancar dengan Andi Faisal (wawancara 8 januari 2024) mengatakan bahwa:

“Pembangunan yang direncanakan sangat sesuai dengan pembangunan yang dilaksanakan, karena rencana pada saat rapat dan itu juga yang dilaksanakan”

Partisipasi masyarakat memperkuat kesinambungan dan akseptabilitas pembangunan yang akan di laksanakan. Hasil wawancara dengan Taufik (wawancara 11 januari 2024) mengatakan bahwa:

“Semua pembangunan yang dilakukan di desa sudah sesuai dengan perencanaan yang dilakukan sebagaimana yang telah di rencanakan dari awal musrembang”

Sejalan dengan wawancara Ukka (wawancara 14 januari 2024) mengatakan bahwa:

“Sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan dari musrembang sampai penetapan dan diawasi dengan kecamatan dan kabupaten”

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dilapangan bahwa proses perencanaan pembangunan melalui proses musrembang dusun, musrembang desa dan penetapan. Proses perencanaan pembangunan mengikut sertakan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan

dalam program padat karya untuk menciptakan pembangunan yang lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara terkait proses perencanaan, pelaksanaan keterlibatan masyarakat, perencanaan pembangunan bahwa dapat disimpulkan bahwa pendekatan proses padat karya dalam pembangunan adalah bahwa pendekatan ini dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mencapai berbagai tujuan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Program padat karya memberikan manfaat ganda dengan memberikan pekerjaan kepada masyarakat, terutama yang kurang mampu, sambil merangsang pertumbuhan ekonomi dan membangun infrastruktur. Keterlibatan masyarakat bukan hanya sebagai strategi pelibatan, tetapi merupakan prinsip inti dalam pembangunan berkelanjutan.

c. Pendekatan Sasaran

1. Sasaran pembangunan

Sasaran program dalam pembangunan mencakup berbagai aspek untuk mencapai hasil yang diinginkan. Hal ini dapat melibatkan peningkatan ekonomi, kesejahteraan sosial, kesehatan masyarakat, pendidikan dan pelestarian lingkungan. Sasaran yang jelas membantu mengarahkan upaya pembangunan ke arah yang produktif dan berkelanjutan.

Sasaran padat karya dalam konteks pembangunan berkaitan dengan menciptakan lapangan kerja atau peluang kerja. Program padat karya bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan menyediakan pekerjaan atau pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan masyarakat. Berdasarkan

hasil wawancara dengan bapak Haeril, SE, M.Si (wawancara 3 Januari 2024)

mengatakan bahwa:

“Ada sasaran dan ada target, sasaran itu pembangunan yang dilakukan sesuai dengan sasaran. sasaran pembangunan itu misal, bangun jalan tapi sarasanya untuk mempermudah akses ekonomi, berarti sarasanya berapa orang kah yang mengangkut gabahnya melalui jalan tersebut”

Sasaran pemerintah desa program padat karya dalam pembangunan guna menciptakan lapangan kerja dan akses masyarakat lebih mudah dan masyarakat desa berharap bahwa pembangunan akan membawa peningkatan pendapatan masyarakat. hasil wawancara dengan Mursalin S.Pd (wawancara 5 Januari 2024) mengatakan bahwa:

“Dalam proses pembangunan jalan dan jembatan yang telah dilakukan itu sesuai dengan sasaran yang diharapkan, karena sudah memenuhi kebutuhan masyarakat kelangsungan pembangunan dan pemerintah desa telah melakukan pembangunan dinikamtin oleh masyarakat, baik itu pembangunan fisik dan pemberdaya-pemberdayaan masyarakat”

Selanjutnya wawancara dengan Andi Satmawati (wawancara 7 januari 2024) mengatakan bahwa:

“Pembangunan jalan sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan dalam musrembang, apalagi sasaran pembangunan itu masyarakat desa sendiri”

Mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal dengan memberdayakan masyarakat melalui pengembangan keterampilan dan pelatihan serta pemberian pekerjaan. Hasil wawancara dengan Andi Faisal (wawancara 8 januari 2024) mengatakan bahwa:

“Pembangunan infrastruktur sangat bermanfaat bagi masyarakat karna sasaran pemerintah desa dalam untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa”

Sejalan dengan wawancara Taufik (wawancara 11 januari 2024) mengatakan bahwa:

“Manfaat yang telah dilaksanakan sangat menyentuh masyarakat dan apa yang dilaksanakan dalam padat karya sesuai dengan sasaran di tempat tertentu dan didusun masing-masing”

Sasaran padat karya merupakan pendekatan yang dapat memberikan dampak langsung dan nyata bagi masyarakat, terutama dalam konteks peningkatan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi. Hasil wawancara dengan Ukka (wawancara 14 januari 2024) mengatakan bahwa:

“Sesuai dengan yang diharapkan, misal jalan yang rusak memperlancar perekonomian dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat apalagi musim panen memperlancar memuat gabah”

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dilapangan bahwa sasaran pembangunan mencakup berbagai aspek, dimana melibatkan masyarakat desa dalam pembangunan jalan dan jembatan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, meningkatkan ekonomi masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja atau peluang kerja masyarakat desa.

2. Kebutuhan masyarakat

Dalam konteks program padat karya, kebutuhan masyarakat umumnya terfokus pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Masyarakat menginginkan adanya peluang pekerjaan yang layak dan memberikan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Permintaan untuk program padat karya yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, membantu mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan daya beli.

Mempertimbangkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam proses pembangunan adalah kunci untuk menciptakan proyek-proyek yang berkelanjutan dan memberikan manfaat langsung kepada mereka yang terlibat. Kebutuhan akan upaya untuk melibatkan pembangunan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Haeril SE, M.Si (wawancara 3 Januari 2024) mengatakan bahwa:

“Sesuai kebutuhan, karna yang dibangun melalui musrembang, Msyarakat yang hadir atau perwakilannya, BPD, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, perwakilan pemuda, perwakilan perempuan, perwakilan masyarakat miskin hadir dan pemerintah desa melakukan pembangunan dari usulan masyarakat”

Pemrioritaskan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan adalah langkah kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Hasil wawancara dengan Mursalin S.Pd (wawancara 5 Januari 2024) mengatakan bahwa:

“Untuk kebutuhan masyarakat pemerintah desa telah melakukan pembangunan jalan, jembatan, pengerasan jalan tani dan yang dilaksanakan pemerintah desa dalam pembangunan itu usulan dari masyarakat itu sendiri”

Sejalan dengan wawancara Andi Satmawati (wawancara 7 januari 2024) mengatakan bahwa:

“Pembangunan jalan dan jembatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat karna masyarakat yang mengusulkan pembangunan jalan dan jembatan dan pemerintah desa kakulasi dengan dana yang akan digunakan dalam pembangunan”

Selanjutnya wawancara dengan Andi Faisal (wawancara 8 januari 2024) mengatakan bahwa :

“Program yang dibangun adalah yang mengusulkan pembangunan itu dusun masing-masing dan itu yang teralisasi itulah yang dikerjakan”

Berkaitan dengan wawancara Taufik (wawancara 11 januari 2024) mengatakan bahwa:

“progrma pembangunan yang telah dilaksanakan itu kebutuhan masyarakat desa”

Memprioritaskan kebutuhan masyarakat guna memperlancar akses perekonomian masyarakat desa. Hasil wawancara dengan Ukka (wawancara 14 januari 2024) mengatakan bahwa:

“Sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, misal jembatan dusun samaenre biasanya musim hujan petani gak bisa lewat, namun setelah dilakukan pembangunan masyarakat sangat terbantu dalam pembangunan jembatan karna tidak mengalami kendala ketika musim hujan”

Kebutuhan masyarakat dalam pembangunan infrastruktru sangatlah bermanfaat yang memenuhi kebutuhan masyarakat karena dapat meningkatkan aksesibilitas, kualitas hidup, dan meningkatkan perekonomian masyarakat. kebutuhan masyarakat dalam pembangunan program padat karya dapat meningkatkan kemampuan masyarakat, dimana pembangunan seperti jalan, jembatan, irigasi atau sasaran transportasi masyarakat yang mempermudah masyarakat dalam akses bekerja.

Pembangunan yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat memberikan peluang bagi masyarakat dalam mengembangkan usaha kecil dan menciptakan banyak peluang bagi masyarakat dalam memberikan akses yang lebih baik bagi masyarakat dalam bekerja atau mencari pekerjaan.

Program padat karya dalam pembangunan infrastruktur dengan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pembangunan yang direncanakan atau yang dilaksanakan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa kebutuhan masyarakat dalam pembangunan sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, dimana masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam musrembang atau musyawarah baik itu kelompok pemuda, kelompok tani dan pemerintah desa. Kebutuhan masyarakat itulah menjadi prioritas pemerintah desa dalam melakukan pembangunan desa.

3. Keberhasilan pembangunan

Keberhasilan padat karya dalam pembangunan dapat diukur dari berbagai aspek yang mencerminkan dampak positif terhadap masyarakat, ekonomi, dan lingkungan. Keberhasilan padat karya juga dapat diukur dari upaya untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas masyarakat melalui program pendidikan dan pelatihan.

Keberhasilan padat karya juga harus dievaluasi melalui pengukuran dampak jangka panjang, termasuk pemantauan kelangsungan program, kesejahteraan ekonomi masyarakat, dan perubahan positif dalam kondisi sosial dan lingkungan.

Evaluasi yang cermat dan fleksibilitas dalam menyesuaikan program dengan kebutuhan yang berkembang dapat menjadi kunci untuk mencapai keberhasilan dalam pembangunan. Berdasarkan wawancara dengan bapak Haeril SE, M.Si (wawancara 3 Januari 2024) mengatakan bahwa:

“Kalau padat karya itu, menjadi indikator penilai dalam pembangunan desa, padat karya salah satu cara melaksanakan pembangunan. padat karya salah satu cara dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan, bukan menilai padat karya berpengaruh terhadap pembangunan tapi padat karya itu berpengaruh pada ekonomi masyarakat, padat karya pengaruhnya adalah masyarakat yang bekerja”

Keberhasilan pemerintah dalam pembangunan merupakan hasil dari kerjasama yang erat antara pemerintah, dan masyarakat. Evaluasi dan pemantauan yang berkelanjutan terhadap indikator-indikator ini dapat membantu pemerintah untuk melakukan perubahan dan penyesuaian kebijakan guna mencapai tujuan pembangunan jangka panjang. Hasil wawancara dengan Mursalin S.Pd (wawancara 5 Januari 2024) mengatakan bahwa:

“Terkait padat karya, tentu berjalan dengan baik, keberhasilan program padat karya dalam pembangunan merupakan hasil kerja sama dengan pemerintah desa dan masyarakat. misal pemerintah desa merencanakan pembangun dan mempekerjakan masyarakat dengan mengaji sesuai dengan HOK (hari orang kerja)”

Meningkatnya pembangunan dapat memberikan sejumlah manfaat kepada masyarakat jika dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan. Hasil wawancara dengan Andi Satmawati (wawancara 7 januari 2024) mengatakan bahwa:

“Pembangunan yang telah dilakukan pemerintah desa sangat memberikan manfaat bagi masyarakat, meningkatkan pembangunan desa, dan masyarakat menikmati pembangunan yang telah dilaksanakan”

Sejalan dengan wawancara Andi Faisal (wawancara 8 januari 2024) mengatakan bahwa:

“Pembangunan desa sangat berhasil pada masyarakat karna pembangunan-pembangunan yang telah dilakukan sangat berguna pada masyarakat desa”

Pembangunan jalan dan jembatan dapat memberikan banyak akses masyarakat dalam bekerja untuk meningkatkan peluang atau ekonomi masyarakat. Hasil wawancara dengan Taufik (wawancara 11 januari 2024) mengatakan bahwa:

“Program pembangunan desa sangat berhasil meningkatkan pembangunan desa karna selama ini pembangunan didesa yang dirasakan masyarakat sangat baik”

Meningkatnya pembangunan dapat membawa peningkatan akses masyarakat, Dengan adanya pembangunan yang berkualitas, kualitas hidup masyarakat dapat meningkat melalui perbaikan lingkungan. Hasil wawancara dengan Ukka (wawancara 14 januari 2024) mengatakan bahwa:

“Sangat meningkatkan pembangunan desa karna setiap pembangunan yang telah dilakukan sangat bermanfaat bagi masyarakat desa, misalnya pembangunan jalan, jembatan dan lampu penerangan jalan itu sangat bermanfaat bagi masyarakat desa”

Keberhasilan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat desa, dimana pembangunan yang dilaksanakan dapat digunakan secara efisien dan meningkatkan akses bekerja masyarakat dalam jangka panjang. Dalam keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan jalan dan jembatan bahkan irigasi berdampak meningkatkan perekonomian masyarakat dan berdampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

Meningkatkan pembangunan jalan dan jembatan sangat memungkinkan akses yang lebih baik dan meningkatkan konektivitas antar wilayah yang dapat memperluas kesempatan masyarakat untuk mengakses layanan dan peluang ekonomi. Oleh karena itu meningkatkan mobilitas masyarakat memberikan banyak peluang untuk membuka akses pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam perdagangan, pariwisata dan pertanian, bahwa keberhasilan pembangunan dalam program padat karya dapat mempermudah akses masyarakat untuk bekerja, memperlancar perekonomian masyarakat desa.

Keberhasilan pembangunan infrastruktur sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendukung perekonomian masyarakat yang berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan dan keterlibatan aktif dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat memberikan manfaat jangka panjang yang berkelanjutan bagi masyarakat dan perekonomian seluruh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data bahwa dapat disimpulkan bahwa pendekatan sasaran dalam Pembangunan. Sasaran dalam pembangunan menekankan penetapan tujuan spesifik dan terukur sebagai landasan untuk perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan.

Sasaran padat karya melibatkan penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur, Keberhasilan pembangunan dapat diukur dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Program padat karya memberikan sejumlah manfaat, termasuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran, meningkatkan keterampilan.

C. Pembahasan

Sesuai dengan hasil yang telah dipaparkan sebelumnya, Penelitian ini membahas tentang efektivitas program padat karya dalam pembangunan infrastruktur di Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone. Program padat karya dalam pembangunan di desa digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri sehingga desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.

Pembahasan penelitian ini merupakan isi dari hasil analisis data dan fakta yang di dapatkan di lapangan serta di sesuaikan denga teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori efektivitas padat karya menurut Martini dan Lubis, yang mengemukakan 3 pendekatan dalam faktor padat karya diantaranya. Pendekatan sumber, pendekatan proses, dan

pendekatan sasaran. Untuk lebih jelasnya akan dibahas secara terperinci sebagai berikut:

1. Pendekatan Sumber

Menurut martani dan lubis yang mengatakan bahwa Pendekatan sumber mengutamakan keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Keberhasilan padat karya dalam pembangunan infrastruktur di desa dalam pengelolaan sumber daya manusia melibatkan perencanaan guna mencapai tujuan pembangunan yang baik. Pembangunan desa yang melibatkan masyarakat dapat memastikan keberlanjutan dan produktivitas sumber daya manusia.

Program padat karya dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dengan menciptakan lebih banyak peluang pekerjaan bagi masyarakat. Dengan memanfaatkan tenaga kerja secara efisien, program padat karya dapat meningkatkan produktivitas di berbagai sektor ekonomi. memberdayakan masyarakat untuk berkontribusi pada pembangunan atau kegiatan ekonomi lainnya, program padat karya dapat membantu meningkatkan perekonomian lokal.

Menurut Astuti mengungkapkan bahwa partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan.

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan bahwa terdapat ada beberapa pembangunan desa sebagai berikut:

Tabel 3.4 pembangunan desa

No	Sumber Pembangunan	Tipe Pembangunan	Jumlah Pembangunan
1	Dusun balangge	1. Jalan tani 2. Jembatan 3. Perbaikan jalan	3
2	Dusun tanah cellae	1. Perbaikan jalan 2. Jalan tani 3. Jembatan	3
3	Dusun samaenre	1. jalan tani 2. pengerasan jalan 3. jembatan 4. lampu jalan	4
4	Dusun labukku	1. jalan tani 2. jembatan 3. perbaikan jalan 4. lampu jalan	4

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa ulubalang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, dimana setiap dusun dilakukan pembangunan sesuai dengan keluhan masyarakat atau kebutuhan masyarakat desa. Pembangun yang dilakukan seperti jalan dan jembatan membantu masyarakat dalam akses bekerja.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah desa sangat bermanfaat bagi masyarakat desa, dimana pembangunan seperti perbaikan jalan, jalan tani, jembatan dan lampu jalan, sangat berdampak positif bagi masyarakat desa. Pembangunan yang telah pemerintahan dapat berdampak terhadap perekonomian masyarakat desa, memperlancar akses masyarakat dalam bekerja.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan bahwa program padat karya dalam pembangunan desa yaitu untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat seperti memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat, memanfaatkan sumber daya manusia. Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sangat melibatkan masyarakat desa, dimana keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dapat meningkatkan kapasitas kelompok tani di desa ulubalang, karena program padat karya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengenai pendekatan sumber program padat karya dalam pembangunan infrastruktur di desa. Pembangunan desa dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone yang diukur dari aturan tentang desa mengenai padat karya, dapat disimpulkan bahwa pendekatan sumber, bahwa pengelolaan sumber daya manusia dalam pembangunan sangat melibatkan masyarakat desa dan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat desa ulubalang.

2. Pendekatan Proses

Menurut Martani Dan Lubis dalam Pendekatan Proses merupakan pelaksanaan Padat Karya dalam program perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggung jawaban secara tertib dan transparan.

Alexander dalam Nurman (2015) menyebutkan bahwa pembangunan adalah transformasi ekonomi, sosial, dan budaya; Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Sanit (dalam Suryono, 2001:32) menjelaskan bahwa pembangunan dimulai dari pelibatan masyarakat. Keuntungan ketika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, yaitu pembangunan akan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya bahwa, jika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, maka akan tercipta kontrol terhadap pembangunan tersebut.

Pendekatan proses program padat karya dalam pembangunan jalan dan jembatan merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan infrastruktur yang dapat memberdayakan masyarakat desa. Pembangunan jalan dan jembatan masyarakat terlibat langsung dalam pembangunan, baik menyediakan tenaga kerja maupun partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Pembahasan hasil wawancara bahwa menjelaskan dalam program padat karya dalam pembangunan, dimana proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban dalam program padat karya dalam pembangunan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Partisipasi masyarakat dapat memiliki dampak positif yang signifikan pada kesejahteraan masyarakat.

Adapun proses perencanaan yang dilakukan pemerintah desa mengadakan musrembang setiap dusun untuk memberikan keluhan atau kebutuhan setiap dusun, setelah itu setiap dusun atau baik dari kelompok pemuda maupun dari kelompok petani ikut berpartisipasi dalam musrembang desa guna memberikan peluang bagi masyarakat desa untuk memberikan ide atau solusi dalam pembangunan yang akan dilaksanakan atau yang terlaksana

Proses perencanaan dalam pembangunan melibatkan masyarakat melakukan musrembang dan penetapan dalam pembangunan desa yang akan dilaksanakan pembangunan, Dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan dalam pembangunan yang melibatkan masyarakat Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone memastikan bahwa kebijakan dan pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

3. Pendekatan Sasaran

Menurut Martani Dan Lubis dalam pendekatan sasaran merupakan Hasil dari program Dana Desa bisa terlihat dari realisasi program-program yang telah direncanakan sebelumnya. Berdasarkan data realisasi Padat karya Tunai Dana Desa.

Shardlow (1998:32), pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok maupun masyarakat berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai keinginan mereka.

Dalam pendekatan sasaran program padat karya dalam pembangunan, dimana kebutuhan masyarakat merujuk pada cara pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berfokus pada kebutuhan masyarakat. Sasaran padat karya dalam pembangunan yaitu memperlancar perekonomian masyarakat, memberikan pekerjaan masyarakat dan menciptakan dampak positif yang signifikan dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data bahwa terdapat anggaran pembangunan yang dilakukan pemerintah desa guna memperlancar pembangunan dalam padat karya sebagai berikut :

Tabel 3.5 Anggaran Pembangunan

No	Pembangunan	Anggaran	Jumlah
1	Jalan Desa	173.649.250	173.649.250
2	Jalan Usaha Tani	118.792.240	118.792.240
3	Lampu Jalan	57.510.000	57.510.000
	Jumlah		349.951.490

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data bahwa pembangunan jalan, jembatan dan lampu jalan dengan menggunakan anggaran dana desa (ADD). Pembangunan jalan desa, jembatan, jalan usaha tani dan lampu jalan pada 2022 menggunakan anggaran sekitar Rp 349.951.490, oleh karena itu pembangunan yang direncanakan dalam penetapan musyawarah sebelumnya guna lebih memprioritaskan kebutuhan setiap dusun.

Pembangunan setiap dusun sudah sangat sesuai, dimana pembangunan seperti jalan dan jembatan yang mempermudah akses masyarakat setiap dusun untuk bekerja dan dapat memperlancar perekonomian masyarakat desa.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa menjelaskan sasaran pemerintah desa dalam program padat karya dalam pembangunan yaitu, Pemerintah desa melaksanakan pembangunan sesuai dengan usulan dari dusun atau masyarakat desa guna mengelola pembangunan yang menjadi kendala masyarakat untuk pergi ke lahan atau sawahnya.

Sasaran padat karya yaitu memperpanjang perekonomian masyarakat, mempermudah akses masyarakat, meningkatkan pembangunan masyarakat seperti perbaikan jalan, jembatan dan lain-lain. Sasaran dalam pembangunan dapat disimpulkan bahwa kebutuhan masyarakat di desa ulubalang kecamatan salomekko kabupaten bone yaitu pembangunan desa yang dilaksanakan bahwa memprioritaskan dalam pembangunan jalan dan jembatan guna memperlancar akses perekonomian masyarakat desa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan analisis data pada padat karya dalam pembangunan infrastruktur di Desa Ulubalang Kabupaten Bone dapat di simpulkan bahwa:

Analisi data dalam Program padat karya di desa, program ini berhasil melibatkan masyarakat setempat dalam pembangunan, memberikan pekerjaan, dan meningkatkan keterampilan masyarakat, mencerminkan program padat karya tersebut berhasil mencapai tujuannya, memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat setempat, dan dampaknya dapat dirasakan dalam jangka panjang yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pemerintah desa pada padat karya dalam pembangunan infrastruktur di desa ulubalang dalam memberikan kepuasan terhadap masyarakat desa ulubalang adalah bentuk mesejahterakan masyarakat sebagai berikut: Pembangunan jalan dan jembatan dapat mempermudah akses masyarakat dalam bekerja. Dalam pembangunan jalan tani dapat memperlancar perekonomian masyarakat dalam bertani

B. Saran

1. Berdasarkan hasil kesimpulan, maka rekomendasikan saran sebagai berikut:
Diharapkan pemerintah desa untuk dapat memastikan kebutuhan masyarakat. keterbatasan anggaran dana desa (ADD) untuk lebih memprioritaskan pembangunan yang lebih memiliki dampak paling besar.
2. Diharapkan pemerintah desa dalam perizinan pembangunan jalan dan jembatan untuk meningkatkan komunikasi terhadap berbagai pihak dalam pembangunan jalan seperti melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pembangunan jalan.



DAFTAR PUSTAKA

- Agussalim. (2015). *Implementasi alokasi dana desa di desa ulubalang kecamatan salomekko kabupaten bone*. (1465140008), 1–13.
- Approach, C. G. (2016). *Institusi kewenangan pembangunan*. 1–23. Retrieved from <https://www.bnm.gov.my/documents/20124/834776/cp06.pdf>
- Asnudin, A. (2009). Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dengan Pelibatan Masyarakat Setempat. *Jurnal SMARTek*, 7(4), 292–300.
- Asnudin, A. (2010). Pendekatan Partisipatif dalam Pembangunan Proyek Infrastruktur Perdesaan di Indonesia. *Jurnal SMARTek*, 8(3), 182–190.
- Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa The Village Autonomy and The Effectiveness of Village Fund. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 193–211.
- Azizah, N. (2017). Strategi Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Desa Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi pada desa candimas kecamatan abung selatan kabupaten lampung utara). *BMC Public Health*, 5(1), 1–8. Retrieved from <https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/siklus/article/view/298%0Ahttp://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jana.2015.10.005%0Ahttp://www.biomedcentral.com/1471-2458/12/58%0Ahttp://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&P>
- Bahtera, M., & Herizal, H. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan. *Jurnal Sains Riset*, 12(3), 627–631. <https://doi.org/10.47647/jsr.v12i3.846>
- Budiasa. (2019). Implementasi Kebijakan Padat Karya Tunai (PKT) pada Masyarakat Miskin di Desa Lebih, Gianyar. *Public Inspiration ...*. Retrieved from <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration/article/view/1431>
- Chotimah, C. (2019). Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Bululawang. *Jurnal Civic Hukum*, 4(2), 103. <https://doi.org/10.22219/jch.v4i2.9184>
- Defianti. (2021). Pengaruh Infrastruktur, Indek Pembangunan Manuia dan Korupsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 3(1), 25. <https://doi.org/10.24036/jkep.v3i1.13513>

- Deswimar, A. D. (2014). Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Pedesaan. *Jurnal EL-RIYASAH*, Vol. 5, p. 41. <https://doi.org/10.24014/jel.v5i1.657>
- Deviyanti. (2007). Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Karangjati Kecamatan Balikpapan Tengah. *EJournal Administrasi Negara*, 1(2), 27. Retrieved from [https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/05/JURNAL DEA \(05-24-13-09-02-30\).pdf](https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/05/JURNAL_DEA_(05-24-13-09-02-30).pdf)
- Dian. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Padat Karya Tunai (Studi Kasus Desa Plandaan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung). *Publika*, 7(4), 6.
- Djunaidi. (2022). Dilema industri padat modal dan tuntutan tenaga kerja lokal. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*. Retrieved from <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi/article/view/1222>
- Fanida. (2014). *Three-Sector Partnership Dalam Pembangunan Ekonomi*.
- Fitri, S. (2019). Efektivitas Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah di Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. *OECOMICUS Journal of Economics*, Vol. 4, pp. 57–69. <https://doi.org/10.15642/oje.2019.4.1.57-69>
- Handayani. (2023). *Analisis Efektivitas Program Padat Karya Tunai (Pkt) Terhadap Pemanfaatan Dana Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Retrieved from [http://repository.radenintan.ac.id/28590/%0Ahttp://repository.radenintan.ac.id/28590/1/SKRIPSI 1-2.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/28590/%0Ahttp://repository.radenintan.ac.id/28590/1/SKRIPSI%201-2.pdf)
- Hardianti. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Program Alokasi Dana Desa Di Desa Buntongi Kecamatan Ampana Kota). *Jurnal Katalogis*, 5(1), 120–126. Retrieved from <http://elkanagoro.blogspot.co>.
- Hariyanto. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Tahunan Di Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula. *Journal of Governance and Public Policy*, 1(3). <https://doi.org/10.18196/jgpp.2014.0022>
- Hasan. (1967). Efektivitas Kinerja Pelayanan Kelurahan Wonokusumo Terhadap Program Padat Karya Dispendukcapil Surabaya. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(Mi), 5–24.

- Henryk, S. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda. *Journal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 612–625. Retrieved from [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/05/jurnal_henryk_\(05-30-13-06-30-56\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/05/jurnal_henryk_(05-30-13-06-30-56).pdf)
- Herdiyana. (2020). Pengaruh Padat Karya Tunai Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pedesaan Prov. Jawa Barat dan Riau. *Jurnal Ekonomi Dan Industri*, 20(3), 49–65. <https://doi.org/10.35137/jei.v20i3.360>
- Hidayah, D. D. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Desa Pameutingan Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya. *JURNAL ILMIAH ILMU ADMINISTRASI*, Vol. 9, pp. 14–21. <https://doi.org/10.33592/jiia.v10i1.526>
- Hidayat. (2017). *Katingan Community Participation In Development Planning Of Banut Kalanaman Village , Katingan Hilir Subdistrict , Katingan District*. Retrieved from [https://com-mendeley-prod-publicsharing-pdfstore.s3.eu-west-1.amazonaws.com/d4ae-CC-BY-2/10.33084/restorica.v3i2.731.pdf?X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEMX%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FwEaCWV1LXdlc3QtMSJGMEQCIFtR87rKGtQjhiS3dcnGXnJORyLVs9xSrS34vDwQY](https://com-mendeley-prod-publicsharing-pdfstore.s3.eu-west-1.amazonaws.com/d4ae-CC-BY-2/10.33084/restorica.v3i2.731.pdf?X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEMX%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FwEaCWV1LXdlc3QtMSJGMEQCIFtR87rKGtQjhiS3dcnGXnJORyLVs9xSrS34vDwQY)
- Jazuli. (2021). Analisis Efektivitas Padat Karya Tunai Dana Desa. *Analisis Efektivitas Padat Karya Tunai Dana Desa*.
- Juwandi. (2022). Perencanaan Pembangunan Partisipatif Guna Mewujudkan Aspirasi Masyarakat Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. *Pallangga Praja*, 4(2), 125–131.
- Kulla. (2018). Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Tinggilbet Distrik Beoga Kabupaten Puncak Provinsi Papua. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(58), 3.
- Laily, E. I. N. (2015). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif,” kebijakan dan manajemen publik. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3(3), 186–190.
- Latif. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal MODERAT*, 5(1), 5. Retrieved from <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/1898>

- Lestanata. (2016). Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014 – 2015. *Journal of Governance and Public Policy*, 3(3), 368–389. <https://doi.org/10.18196/jgpp.2016.0063>
- Lubis, A. (2009). Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. *Jurnal Tabularasa PPS UNIMED*, 6(2), 181–190.
- Mael, M. Y. (2017). Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani melalui Program Padat Karya Pangan di Kecamatan Noemuti. *AGRIMOR*, Vol. 2, pp. 48–49. <https://doi.org/10.32938/ag.v2i04.321>
- Mahameru, Y. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembangunan Infrastruktur Daerah: Systematic Literatur Review. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani*, 9(2), 120–136.
- Mahayana, W. (2013). Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 400–414. Retrieved from ejournal.ip.fisip-unmul.org
- Mamoto, N. (2018). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–11.
- Meilinawati. (2018). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Program Padat Karya Di Kecamatan Magelang Utara. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN)*, 2(2), 84–96.
- Miranti. (2022). Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan di Desa Warukin Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 22, p. 932. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i2.2100>
- Mondong, H. (2013). Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *Governance*, 5(1), 1–18.
- Muziza, A. (2020). Penerapan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) Terhadap Efektivitas&Efisiensi Kinerja Di Diskominfo Kabupaten Semarang. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(1), 37–43. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.286>

- Nadira, Z. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada Tahun 2021. *γ787*, (8.5.2017), 2003–2005.
- Novanto. (2023). Implementasi Program Padat Karya Tunai Desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 14, p. 179. <https://doi.org/10.31258/jkp.v14i2.8207>
- Nur, F. (2011). Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Kasus: Program Alokasi Dana Desa di Desa Bialo Kabupaten Bulukumba). *Jurnal*, 1–8.
- Nurhayati, D. (2019). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis, Dan Manajemen (JPEKBM)*, 1(2), 1–12. Retrieved from <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1682316&val=18270&title=EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT>
- Ohoirat, B. (2021). *Pengaruh Perencanaan Pembangunan Terhadap Keberhasilan Pembangunan Di Desa Ohoitel Kecamatan Dullah Utara Kota Tual*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/rc29t>
- Olbata, A. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Pedesaan Di Desa Kauneran 1 Kecamatan Sonder. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(64), 28–35.
- Pawening. (2021). Implementasi Program Padat Karya Tunai Dalam Mengurangi Pengangguran di Desa Wonoenggal, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 1(2), 1–13.
- Posumah, F. (2015). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur terhadap Investasi di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisien*, 15(2), 1–13.
- Puspasari, A. (2013). Perencanaan Partisipatif Dalam Pembangunan Daerah. *Archiv Für Experimentelle Pathologie Und Pharmakologie*, 141(5–6), 307–328. <https://doi.org/10.1007/BF02002689>
- Putra, Y. &. (2022). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Sebelum dan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Tanjung Medang Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 4(2), 163–174. <https://doi.org/10.31851/jmediasi.v4i2.7859>

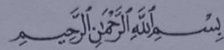
- Rahman, K. (2016). Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 2(2), 189–199. Retrieved from <https://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1788>
- Rama. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Selama Masa Pandemi Covid 19. *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*, Vol. 2, pp. 13–24. <https://doi.org/10.38156/jisp.v2i3.151>
- Ramadhan, W. D., & Ma'ruf, M. F. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Dana Desa (Studi Pada Desa Semambung, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo). *Publika*, 429–440. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n2.p429-440>
- Rauf, S. (2021). *Partisipasi Masyarakat*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/xz5td>
- Renyaam. (2019). Efektivitas Corporate Social Responsibility (Csr) Pt. Freeport Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Kabupaten Mimika Provinsi Papua. *Jurnal Eksekutif*, 3(3), 1–11. Retrieved from file:///C:/Users/user/Downloads/28163-57867-1-SM.pdf
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Risa, A. a. (2021). Implementasi Program Padat Karya Tunai Dari Dana Desa dalam Mengatasi Kemiskinan Masyarakat Desa Karang Gading. *Perspektif*, 10(2), 739–753. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.5207>
- Roni. (2019). Padat Karya Sebagai Kontribusi Kehidupan Masyarakat Pada Penggunaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Kaneyan Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan). *Holistik*, 12(2), 1–21.
- Saepul. (2022). Efektivitas Program Padat Karya Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Kertamukti Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran. *Universitas Galuh*, 2(1), 1641–1651.
- Santika. (2022). *Evaluasi Program Padat Karya Tunia (KRT) Dalam Pembangunan Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu*.
- Sarfan. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Padat Karya Tunai Desa Mootilango. *Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat)*, 11(1), 21–35. Retrieved from <https://ejournal.ung.ac.id/index.php/sibermas/article/view/12008>

- Sarlina, E. a. (2022). *Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Evaluation of Village Fund Allocation Management in Efforts to Improve Community Development and Empowerment)*. 1(1), 25–43.
- Setianingsih. (2019). Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Simrenda) (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan). *Fakultas Administrasi Universitas Brawijaya Malang*, 1(5), 87–101.
- Setiawa & Megawati. (2022). Evaluasi Kebijakan Padat Karya Tunai Di Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, 665–680. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n2.p665-680>
- Setyadiharja, R. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan di Kota Tanjungpinang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 3(1), 71. <https://doi.org/10.24905/jip.v3i1.864>
- Sofi, I. (2020). Implementasi Padat Karya Tunai Dana Desa untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo. *Matra Pembaruan*, 4(1), 25–35. <https://doi.org/10.21787/mp.4.1.2020.25-35>
- Sulastri, N. (2016). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna. *Ucv*, 1(02), 390–392. Retrieved from https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/55974842/B1A112158_sitedi_SK_RIPSI_NOVA_SULASTRI_B1A1_12_158-libre.pdf?1520307209=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DSKRIPSI_EFEKTIVITAS_PENGLOLAAN_ALOKASI.pdf&Expires=1692822252&Signature=c-SrTzGac6be
- Sumarto. (2019). *Pemanfaatan Dana Desa Untuk Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Pedesaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa*. 2(2), 65–74.
- Suryawardana. (2015). Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat Di Kota Semarang. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 17(1), 82. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v17i1.505>
- Tenri, A. (2019). Kelompok Tani (Studi Kasus Di Desa Siawung Kecamatan Barru Kabupaten Barru). *Meraja Journal*, 2(1), 35–47.

- Windiasih, R. (2019). Komunikasi Pembangunan di Era Digital melalui e-Government dalam Pelayanan Publik dan Pemberdayaan. *Suluh Pembangunan : Journal of Extension and Development*, Vol. 1, pp. 14–21. <https://doi.org/10.23960/jsp.v1i1.6>
- Yanti, M. F. F. (2022). *Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Tahun Dalam Menunjang Pembangunan Di Desa Nasreuhe Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue*.
- Yuliana. (2016). *Evaluasi Pelaksanaan dan Strategi Keberlanjutan Program Padat Karya Pangan di Kabupaten Timor Tengah Utara*. 2(4), 171–176.







PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI

Nomor : 2336/FSP/A.5-VI/IX/1445/2023

Berdasarkan usulan judul penulisan skripsi mahasiswa tentang rencana judul dan susunan pembimbing mahasiswa dan telah disetujui Ketua Jurusan. Dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar menugaskan pengajar yang namanya tersebut di bawah ini sebagai pembimbing penulisan skripsi saudara :

N a m a : Feri
Stambuk : 105641103220
J u r u s a n : Ilmu Pemerintahan

Dengan Rencana Judul Skripsi :


**"Efektivitas Program Padat Karya Dalam Pembangunan Infrastruktur
di Desa Ulubalang Kabupaten Bone"**

Pembimbing I : Drs. H. Ansyari Mone, M.Si
Pembimbing II : Muhammad Amri Pratama Putra, S.IP., M.AP

Tugas ini hendaknya dilaksanakan secara sistematis, berkesinambungan dan bertanggungjawab, serta dilakukan evaluasi secara berkala tentang kemajuan dan Hasil penulisan yang telah dicapai.

Di tetapkan : di Makassar,
Pada tanggal : 4 September 2023

D e k a n,


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si.
NBM. 730 727

Tembusan Kepada yth :

1. Pembimbing I
2. Pembimbing II
3. Ketua Jurusan
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Arsip



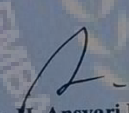
PERSETUJUAN SEMINAR PROPOSAL

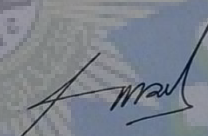
Judul Proposal Penelitian : Efektivitas Program Padat Karya Dalam
Pembangunan Infrastruktur Di Desa
Ulubalang Kabupaten Bone
Nama Mahasiswa : Feri
Nomor Induk Mahasiswa : 105641103220
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui:

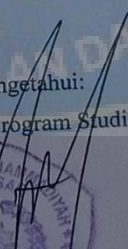
Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd


Muhammad Amril Pratama Putra, S.IP., M.AP

Mengetahui:
Ketua Program Studi


Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I
NBM: 1207 163



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Kampus Tamalatea : Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90221
Telp. 0411 - 866972 Ps. 25 Faks. (0411) 865588

**SURAT KETERANGAN
HASIL PERBAIKAN UJIAN SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

Nama : FERI
Nomor Stambuk : 105641103220
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Penelitian : Efektifitas Program Padat Karya Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Ulubalang Kabupaten Bone

Nama Tim Penilai	Disetujui Tanggal	Tanda Tangan
Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd (Ketua)	16/12/2023	
Rudi Hardi, S.Sos., M.Si	14/12/2023	
Muhammad Randhy A, S.IP., M.Si	13/12/2023	
Muh. Amril Pratama P, S.IP., M.AP	19/12/2023	

Makassar, 2023
Mengetahui :
Ketua Prodi

Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I



Universitas
Muhammadiyah
Makassar
Integrity - Professionalism - Entrepreneurship

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Faculty of Social and Political Sciences

Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221
Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588
Official Email : fisisip@unismuh.ac.id
Official Web : <https://fisisip.unismuh.ac.id>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 2867/FSP/A.1-VIII/XII/1445 H/2023 M
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

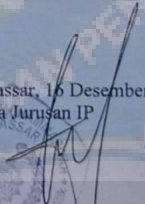
Nama Mahasiswa : Feri
St a m b u k : 10564 11032 20
J u r u s a n : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : Di Desa Ulubalang Kabupaten Bone
Judul Skripsi : *"Efektivitas Program Padat Karya dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Ulubalang Kabupaten Bone"*

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu. Khaeran Katziraa.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 16 Desember 2023
Ketua Jurusan IP


Ahmad Harakan, S.IP, M.H.I
NBM : 1207 165



Kemajuan Untuk Bangsa dan Ummat Manusia
Dedication for the Nation and Ummat

Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Pemerintahan - Ilmu Komunikasi
Public Administration - Government Studies - Communication Science



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 3024/05/C.4-VIII/XII/1445/2023
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

17 Jumadil Awal 1445
30 Nopember 2023 M

Kepada Yth,
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di -
Makassar

السلامة عليكم ورحمة الله وبركاته

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 2867/FSP/A.1-VIII/XII/1445/2023 tanggal 16 Desember 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : FERI
No. Stambuk : 10564 1103220
Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"EFEKTIVITAS PROGRAM PADAT KARYA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA ULUBALANG KABUPATEN BONE"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 21 Desember 2023 s/d 21 Februari 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

السلامة عليكم ورحمة الله وبركاته

Ketua LP3M,



D. Muhsin, Arief Muhsin, M.Pd

NBM 1127761



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 31705/S.01/PTSP/2023 Kepada Yth.
Lampiran : - Bupati Bone
Perihal : Izin penelitian

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 3024/05/C.4-VIII/XII/1445/2023 tanggal 30 November 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : FERI
Nomor Pokok : 105641103220
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" EFEKTIVITAS PROGRAM PADAT KARYA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA ULUBALANG KABUPATEN BONE "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **21 Desember 2023 s/d 21 Februari 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 16 Desember 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar,
2. *Pertinggal.*

Nomor: 31705/S.01/PTSP/2023

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksampul hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :
<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>

NOMOR REGISTRASI 20231216897733



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code





**PEMERINTAH DESA ULUBALANG
KECAMATAN SALOMEKKO
KABUPATEN BONE**

Alamat Sekretariat : Jln.Poros Balange – Patimpeng

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 04/SKTMP/DSUB/SLM/I/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Haeril, SE, M.Si
Jabatan : Kepala Desa Ulubalang
Alamat : Tanah Litae Desa Ulubalang Kec. Salomekko

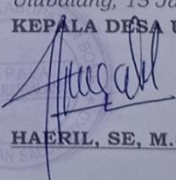
Dengan Ini Menyatakan :

Nama : **FERI**
NIM : 1056411003220
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar
Alamat : Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko

Bahwa benar telah menyelesaikan penelitian di Desa Ulubalang Kec. Salomekko Kab. Bone, dengan judul Skripsi “ **EFEKTIVITAS PROGRAM PADAT KARYA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA ULUBALANG KECAMATAN SALOMEKKO KABUPATEN BONE**” Dengan waktu penelitian 21 Desember 2023 sampai 21 Februari 2024

Demikian surat keterangan ini kami buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ulubalang, 15 Januari 2024
KEPALA DESA ULUBALANG


HAERIL, SE, M.Si

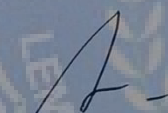
PERSETUJUAN HASIL PENELITIAN

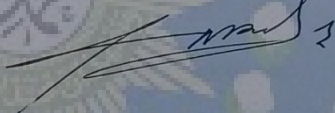
Judul Proposal Penelitian : Efektivitas Program Padat Karya Dalam
Pembangunan Infrastruktur Di Desa
Ulubalang Kabupaten Bone
Nama Mahasiswa : Feri
Nomor Induk Mahasiswa : 105641103220
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

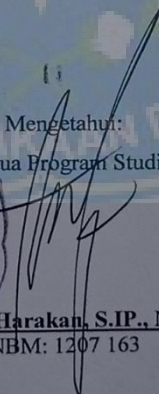

Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd


Muhammad Amril Pratama Putra, S.IP., M.AP

Mengetahui:

Ketua Program Studi




Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I
NBM: 1207 163



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus Tamalatea : Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90221
Telp. 0411 - 866972 Ps. 25 Faks. (0411) 865588

PERSETUJUAN

HASIL PERBAIKAN UJIAN HASIL

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Nama : FERI
Nomor Stambuk : 105641103220
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Penelitian : Efektivitas Program Padat Karya Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Ulubalang Kabupaten Bone

NO	Nama Tim Penilai	Disetujui Tanggal	Tanda Tangan
1	Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd (Ketua)	10-02-2024	
2	Muhammad Amril Pratama P, S.IP., M.AP	13.02.2024	
3	Nursaleh Hartaman, S.IP., M. IP	10-02-2024	

Makassar, 2024

Mengetahui

Ketua Prodi

Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I

PERSETUJUAN UJIAN AKHRI

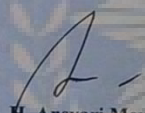
Judul Skripsi : Efektivitas Program Padat Karya Dalam
Pembangunan Infrastruktur Di Desa
Ulubalang Kabupaten Bone

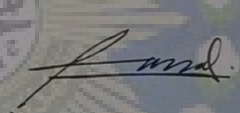
Nama Mahasiswa : Feri
Nomor Induk Mahasiswa : 105641103220
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd


Muhammad Amril Pratama Putra, S.IP., M.AP


Mengetahui:

Dekan

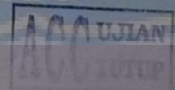
Ketua Program Studi

Fisip Unismuh Makassar

Ilmu Pemerintahan


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.si

NBM. 730 727


Ahmad Hara Kan, S.IP., M.H.I

NBM. 1207 163



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus Tamalatea : Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90221
Telp. 0411 - 866972 Ps. 25 Faks. (0411) 865588

PERSETUJUAN

HASIL PERBAIKAN UJIAN AKHIR
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Nama : FERI
Nomor Stambuk : 105641103220
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Penelitian : Efektivitas Program Padat Karya Dalam Pembangunan Infrastruktur Di
Desa Ulubalang Kabupaten Bone

NO	Nama Tim Penilai	Disetujui Tanggal	Tanda Tangan
1	Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd (Ketua)	24-02-2024	
2	Muhammad Amril Pratama P, S.IP., M.AP	24.02.2024	
3	Nursaleh Hartaman, S.IP., M. IP	23/02/2024	
-		-	

Makassar, 25.02 2024

Mengetahui :

Ketua Prodi

Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972,881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Feri

Nim : 105641103220

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	23 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	7 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 17 Februari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nur Syarifah, M.P.

NIM. 904 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id



Kantor Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone



Dokumentasi Struktur Desa Ulubalang



Dokumentasi Tempat Pelayanan Masyarakat Ulubalang



Dokumentasi Ruangan Kepala Desa Ulubalang



Dokumentasi Wawancara Bapak Kepala Desa Ulubalang



Dokumentasi Wawancara Bapak Sekretaris Desa Ulubalang



Dokumentasi Wawancara Andi Satmawati



Dokumentasi Wawancara Bapak Andi Faisal



Dokumentasi Wawancara Bapak Taufik



Dokumentasi Wawancara Bapak Ukka



Dokumentasi Pengerasan Jalan



Dokumentasi Perbaikan Jalan



Dokumentasi Pengerasan Jalan



Dokumentasi Perbaikan Jembatan



Dokumentasi Pengerasan Jalan



Dokumentasi Jembatan

RIWAYAT HIDUP



Feri Lahir Di Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone pada tanggal 01 September 2002, anak ketiga dari pasangan Ambo Tuo dan Upe. Peneliti memulai pendidikan formal pada tahun 2009, di SD Negeri 255 Ulubalang Kabupaten Bone dan berhasil menyelesaikan pendidikan pada tahun 2014. Pada tahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Salomekko Kabupaten Bone dan tamat pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 8 Bone Kabupaten Bone dan tamat pada tahun 2020. Pada tahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar Jurusan Program Studi Ilmu Pemerintahan dan selesai pada tahun 2024.